

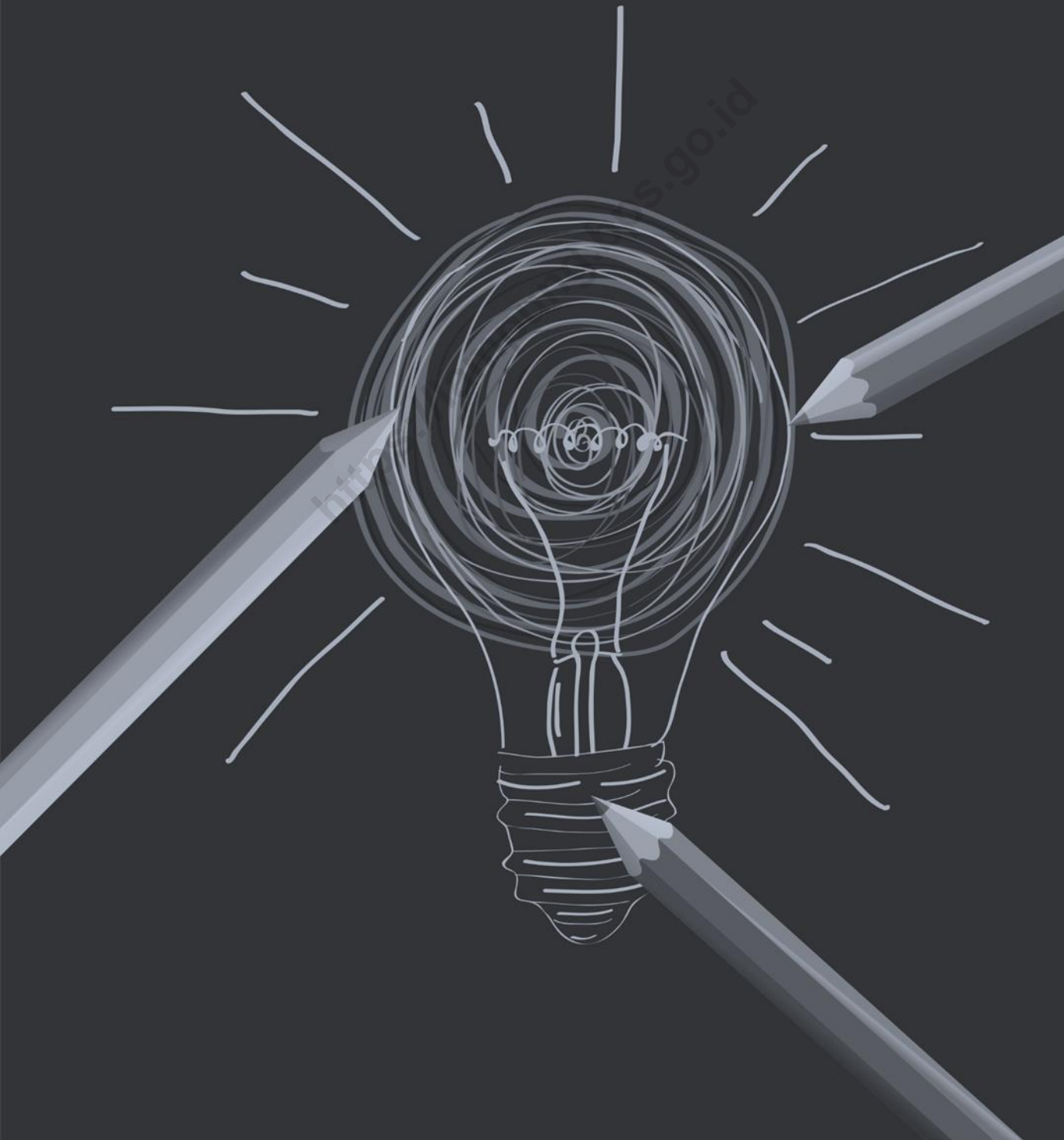
Kumpulan Opini

Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021



Kumpulan Opini

Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021



Kumpulan Opini Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021

ISBN : 978-602-7746-83-1

Nomor Publikasi : 18000.2147

Katalog : 1205044.18

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 136 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penerbit :

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak :

-

Sumber Ilustrasi :

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

<https://lampung.bps.go.id>



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.
Kepala BPS Provinsi Lampung

Tim Penyusun

Kumpulan Opini

Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021

Pengarah :

Endang Retno Sri Subiyandani

Penyunting :

Nurul Andriana

Gun Gun Nugraha

Penulis :

Ari Rusmasari

Bayu Juniardi

Delvi Rutania Prama

Dhyantanu Harsa

Erika Santi

Febiyana Qomariyah

Gun Gun Nugraha

Hardianty

Lenna Nalurita

Nurul Andriana

Sartika Yuliana Siregar

Wike Yulia

Woro Ayu Prasetyaningtyas



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Kumpulan Opini Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021** dapat terbit.

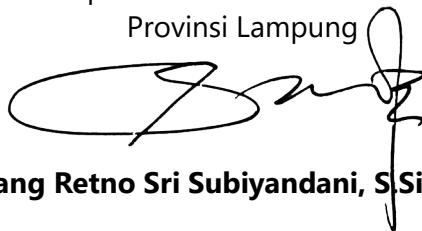
Pengembangan SDM merupakan bagian proses bisnis yang penting bagi organisasi. Banyak media yang dapat digunakan untuk mengembangkan SDM organisasi, salah satunya mengembangkan minat menulis. Menulis dapat men-stimulasi kreativitas dan daya kritis seseorang yang ujungnya kemudian akan menjadi aset organisasi.

Saya mengamati banyak talenta bagus dalam menulis di lingkungan BPS Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, BPS Provinsi Lampung harus memfasilitasi dan mendukung "hobi" ini terutama di tengah era fungsional saat ini. Menulis adalah media mendekatkan diri antara BPS dengan masyarakat. Harapannya, melalui menulis, masyarakat lebih *welcome* dan lebih akrab dengan data.

Buku **Kumpulan Opini Pegawai BPS Provinsi Lampung 2021** ini merupakan kumpulan tulisan opini para pegawai BPS Provinsi Lampung yang dipublikasikan melalui media massa dan elektronik selama tahun 2021.

Selamat atas terbitnya buku ini. Kami berharap semoga buku ini memberikan warna dalam pengembangan SDM di lingkungan BPS Provinsi Lampung khususnya dan BPS se-Indonesia secara umum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Ari Rusmasari	1
Era Kecerdasan Buatan dan Tantangan	3
Bermedia Sosial dengan Cerdas	5
Preventif dengan <i>Game Online</i>	7
Belanja Sayur Mudah Tanpa Keluar Rumah	9
Bayu Juniardi	11
Bonus Demografi di Kala Pandemi	13
Delvi Rutania Prama	17
Peran Pemerintah dan Keluarga dalam Pelestarian Bahasa Ibu	19
Dhyantanu Harsa	23
Menjamin Tata Kelola Beras	25
Menjaga Harga Beras	27
Harga Gabah Kembali Pasrah	29
Harapan Baru Petani Lampung	31
Erika Santi	35
Menuju Petani Lampung Berjaya	37
Febiyana Qomariyah	41
Pelaku Usaha Lampung, Berat Melangkah di Tengah Wabah	43
Waspada Membeludaknya Pengangguran Terdidik	48
Menilik Bonus Demografi Menuju Lampung Berjaya	51
Stabilitas Harga dan Rantai Distribusi Telur Ayam Ras	54
Kecemasan Naiknya Harga Pangan Jelang Hari Raya	57
Vaksinasi dan Gairah Ekonomi Lampung	61
Mendorong Pembangunan Desa Melalui Data Podes	64
Bahagiakah Penduduk Indonesia Selama Pandemi?	67
PPN Sembako, Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi	71
Ekonomi Tumbuh di Tengah PPKM, Mungkinkah?	74
Generasi Milenial Dongkrak Sektor Pertanian	77

Gun Gun Nugraha	81
Bonus Demografi, Makmur Ekonomi?	83
Mengapa NTP Lampung Rendah?	86
Membangkitkan Budaya Literasi	89
Sejahteralah Nelayan Indonesia	92
Bila Sembako Kena Pajak	95
Tantangan Tumbuh Kembang Anak Indonesia	98
Hardianty	103
Usul Impor Beras di Lumbung Padi	105
Hari Pengendalian Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2021	108
Lenna Nalurita	111
Masker sebagai Pertahanan Terdepan	113
Nurul Andriana	115
Pandemi dari Lensa Ekonomi	117
Sartika Yuliani Siregar	121
Potret Kemiskinan Lampung	123
Wike Yulia	127
Potensi Generasi Z dan Milenial Lampung di Tengah Era Ekonomi Digital	129
Woro Ayu Prasetyaningtyas	133
Sensus Pertanian 2023 untuk Pertanian Maju	135

<https://lampung.bps.go.id>



Ari Rusmasari, S.S.T., M.Si.
Pranata Komputer Ahli Muda
Koordinator Fungsi IPDS
BPS Kota Bandar Lampung

Era Kecerdasan Buatan dan Tantangan

Hadirnya teknologi berperan besar bagi kemajuan suatu bangsa. *Artificial Intelligence* atau yang lebih dikenal sebagai kecerdasan buatan merupakan suatu bidang di ilmu komputer yang mengembangkan sistem komputer sehingga mampu berpikir dan berperilaku seperti layaknya manusia. Perilaku seperti melihat, berbicara, bergerak, dan mengambil keputusan secara otomatis dikembangkan di berbagai bidang seiring dengan revolusi industri 4.0.

Keberadaan kecerdasan buatan sebagai suatu objek digital memiliki kemampuan melakukan berbagai pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga maupun kecerdasan manusia. Beberapa contoh kecerdasan buatan dalam keseharian kita antara lain *google assistant*. Fasilitas ini merupakan salah satu produk dari kecerdasan buatan yang bisa jadi sering kita gunakan dalam penggunaan *smartphone*.

Kemampuannya mampu menerima perintah untuk membuka aplikasi, mesin pencari web, memutar musik atau video, atau bahkan melakukan panggilan secara otomatis. Selain itu, munculnya kamera berteknologi kecerdasan buatan juga sangat memanjakan pengguna gadget. Kualitas gambar yang mumpuni dengan hasil yang tajam serta mampu mengidentifikasi secara otomatis objek. Dalam rutinitas pun sebagian masyarakat tidak lepas dari transportasi online yang didalamnya juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Keuntungan strategis lain dari kecerdasan buatan ini adalah kemajuan teknologi robotika. Pemanfaatan tenaga kerja otomatis atau robot dapat mempercepat dalam pekerjaan serta penghematan biaya produksi khususnya pada sektor industri. Penggunaannya juga dapat meminimalisir human error. Provinsi Lampung yang dihuni sekitar 9 juta jiwa penduduk (Sensus Penduduk 2020) merupakan wilayah strategis karena menjadi pintu gerbang dalam lintas Pulau Jawa dan Sumatra.

Adanya berbagai perguruan tinggi maupun swasta memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan melalui riset-riset yang dilakukan. Efek dengan adanya kecerdasan buatan ini, akan ada pekerjaan yang hilang karena otomasi. Namun, di sisi lain akan bermunculan pula berbagai pekerjaan baru di masa depan seperti game developer, programmer, spesialis digital konten, dan lain sebagainya.

Mengintip data pada dua tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung mengalami peningkatan yaitu 69,06 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 70,16 persen di tahun 2020. Angka-angka ini menyiratkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, dimungkinkan terciptanya jenis lapangan kerja baru. Hal ini juga dikarenakan terjadinya pandemi sehingga memunculkan pekerjaan baru yang didukung kecerdasan buatan salah satunya adalah *e-commerce*.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat namun pada dasarnya tidak sepenuhnya tergantung pada kecerdasan buatan ini. Berbagai pekerjaan juga masih membutuhkan manusia sebagai pelaku kegiatannya. Namun, kita dituntut mampu untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi terkini. Sistem pendukung juga pasti tidak lepas dengan kehadiran teknologi.

Pekerjaan besar bagi pemerintah adalah bagaimana bisa mempersiapkan masyarakat dan tenaga kerja yang ada agar mampu bertahan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang. Selalu memperbaharui informasi perkembangan teknologi terkini, berani mencoba hal-hal yang baru, serta berinovasi merupakan tuntutan di era sekarang ini. Metode pembelajaran dalam bidang pendidikan juga memerlukan penyesuaian. Dukungan penggunaan teknologi terkini dalam proses pembelajaran juga akan berpengaruh dalam penciptaan tenaga kerja yang handal dan diharapkan ke depannya mampu menciptakan bidang bisnis yang baru dan kompetitif.

Tanggal Terbit : 2 Juni 2021
Media : teraslampung.com
Tautan : <https://www.teraslampung.com/era-kecerdasan-buatan-dan-tantangan/>

Bermedia Sosial dengan Cerdas

Interconnection networking atau yang lebih dikenal sebagai internet bisa jadi sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang di saat ini. Mulai dari kebutuhan yang sifatnya privasi sebagai alat komunikasi, sarana hiburan, maupun sebagai sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai lini sudah menggunakan fasilitas secara digital. Pesatnya perkembangan teknologi harus sejalan dengan perkembangan infrastruktur telekomunikasi dan didukung dengan masyarakat yang melek digital.

Bandar Lampung sebagai kota terbesar sekaligus ibukota di Provinsi Lampung menyimpan potensi sebagai kawasan andalan nasional yang ditargetkan sebagai *smart city*. Konsep *smart city* yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak terbatas hanya pada tata kelola kota dan solusi berbasis digital untuk peningkatan layanan publik tetapi juga mewujudkan konsep pengembangan sumber daya manusia itu sendiri terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik di tahun 2020, warga yang mengakses internet di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 66,13 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa lebih dari setengah penduduk Kota Bandar Lampung sudah mengakses dunia maya. Sebanyak 84,02 persen di antaranya menggunakan telepon seluler (HP) maupun laptop.

Sekitar 86,63 persen masyarakat mengakses internet untuk bersosial media. Berselancar dengan media sosial merupakan aktivitas yang paling disukai oleh masyarakat Kota Bandar Lampung ketika mengakses internet. Mencari informasi maupun mengakses hiburan juga menjadi tujuan bermain di dunia maya selain bermedia sosial.

Sosial media pada era digital ini menjadi kekuatan, hobi, maupun tuntutan. Generasi X sampai dengan generasi milenial pun tidak terlepas dalam menggunakan media sosial ini. Melalui media sosial ini tidak hanya sebagai sarana bertukar informasi, tetapi juga berinteraksi secara *online*. Bermedia sosial tentu memberikan banyak pengaruh dalam masyarakat. Akan dinilai ketinggalan zaman ketika tidak memiliki akun media sosial.

Pergeseran pola perilaku kehidupan sosial serta nilai-nilai budaya merupakan wujud nyata yang dirasakan saat ini. Begitu mudahnya penyebaran informasi,

jaringan pertemanan, mengunggah konten, maupun komunikasi di manapun kita berada menjadi dampak positif yang bisa dirasakan. Dunia bisnis pun sangat diuntungkan dengan begitu mudahnya promosi melalui media sosial ini. Namun, perlu disadari bahwa di balik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, perlu kehati-hatian tentunya terhadap efek negatifnya. Menjadi antisosial, lupa waktu, *cyberbullying*, hingga kejahatan dunia maya sangat mungkin bisa terjadi.

Lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menjadikan media sosial sebagai sarana yang tidak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat. Tentunya dengan mengatur waktu agar hidup lebih bermakna dengan menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Sikap cerdas juga perlu ditanamkan dengan memfilter segala informasi yang benar atau tidak. Lebih selektif dalam memilih pertemanan merupakan bentuk kehati-hatian di media sosial. Hal positif lainnya adalah dengan mengunggah status dan konten dengan hal-hal yang bermanfaat. Hendaknya mulailah dari diri kita untuk menjadi cerdas dan bijak dalam bermedia sosial mengingat perkembangan teknologi digital seiring semakin pesatnya penggunaan media sosial terutama di kalangan generasi milenial.

Melihat IPM Kota Bandar Lampung tahun 2020 sebesar 77,44 dan merupakan angka IPM tertinggi se-Provinsi Lampung. Angka ini juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun juga tidak terlepas dari sejauh mana masyarakat sudah melek digital. Hal ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk bisa menghasilkan generasi yang cerdas dengan dunia digital terutama media sosial.

Sarana prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah seperti hotspot yang tersedia di ruang terbuka publik serta munculnya berbagai provider internet dengan harga bersaing juga sangat membuka ruang bagi masyarakat lebih dekat dengan dunia digital. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk fokus memberikan edukasi melalui pembangunan mental anak-anak bangsa agar mampu memilah dengan hadirnya kemajuan dunia digital.

Tanggal Terbit : 23 Juni 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/bermedia-sosial-dengan-cerdas.html>

Preventif dengan *Game Online*

Dampak buruk khususnya bagi para remaja usia sekolah sangat dirasakan dengan maraknya beberapa aplikasi *game online*. Permintaan pemblokiran pun datang dari salah satu pejabat daerah. Harapan pemblokiran di lingkup nasional maupun regional diajukan seiring dengan luasnya efek yang ditimbulkan dalam hal perkembangan anak, kesehatan mental, maupun pendidikan. Permintaan ini juga didasari tidak adanya kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pemblokiran. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) adalah pihak yang berwenang untuk memblokir game jika terindikasi mengandung tayangan yang dilarang undang-undang. Respon baik disampaikan Kemenkominfo untuk mempertimbangkan permohonan permintaan pemblokiran ini.

Kesenangan yang dihadirkan dalam penggunaan *game online* ini karena bisa diakses di semua level usia dan tersedia di *smartphone* maupun komputer dengan koneksi internet pada akhirnya tidak hanya sebatas sebagai hobi tapi sudah bergeser menjadi komersil. Namun, kemudahan akses ini juga bisa berefek negatif apabila tidak disikapi dengan baik. Tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga menjadi kecanduan adalah salah satunya dan remaja dinilai yang paling berpotensi menerima dampak buruk ini.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, 25,87 persen penduduk Indonesia merupakan generasi milenial (lahir di tahun 1981-1996) dan 27,94 persen generasi Z (lahir di tahun 1997-2012). Dua generasi inilah yaitu sebanyak setengah dari penduduk Indonesia dinilai paling rentan dengan akses game online dan menjadi generasi yang paling menikmati perubahan teknologi.

Tahun 2019 lalu, bulletin psikologi bertajuk Kecanduan *Game Online* pada Remaja yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang menyebut bahwa *game online* berpengaruh buruk di berbagai aspek. Sisi kesehatan, menurunnya daya tahan tubuh karena kurang waktu tidur dan asupan serta gangguan penglihatan bisa ditimbulkan karena akses *game online* yang berlebihan. Secara psikologis, berbagai adegan yang menghadirkan tindakan kekerasan berpengaruh tidak langsung pada kehidupan nyata dengan wujud perilaku emosional. Efek yang lain yaitu menjadi individualis dan egois karena minimnya pertemanan dan interaksi dengan keluarga.

Bidang akademis juga tak lepas dari perhatian. *Game online* yang berlebihan juga berpengaruh buruk dalam kegiatan pembelajaran karena waktu lebih

banyak dihabiskan untuk bermain *game* ketimbang belajar. Banyaknya waktu yang digunakan untuk bermain *game* juga menyebabkan hilang kontak dengan realita dan pada akhirnya menjadi pribadi antisosial. Tak hanya itu, sisi keuangan pun juga terpengaruh. Kocek juga harus tersedia demi pemenuhan kuota internet.

Tindakan preventif perlu dilakukan setidaknya fokus untuk menghilangkan kecanduan. Era adanya pandemi ini juga menjadi tantangan karena berbagai kegiatan banyak dilakukan di rumah. Kurangnya perhatian juga turut memberikan dampak negatif. Orang tua senantiasa memberikan pendampingan dengan pengalihan perhatian anak dari *game* yaitu perubahan perilaku anak yang terjebak di dunia maya beralih dunia nyata. Salah satunya dengan olahraga. Kenali olahraga yang sesuai minat dan bakat. Aturan dalam keluarga tentang pembatasan terhadap penggunaan gadget bisa menjadi pilihan. Berikan jadwal penggunaan *gadget* ataupun jadwal bermain *game* secara terbatas menjadi alternatif untuk fokus mengurangi kecanduan.

Pihak sekolah juga harus memberi andil dengan memberikan motivasi untuk tidak terjebak dan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dengan pertemuan pembelajaran jarak jauh. Dimungkinkan siswa belum memiliki pengetahuan tentang bahayanya bermain *game online*. Tak luput aturan pemerintah secara tegas yang mengatur tentang *game online* ini juga sangat dibutuhkan dengan berbagai pertimbangan. Semua pihak harus bersinergi dalam memberikan pengawasan karena efek *game online* yang luar biasa terhadap pengguna khususnya remaja.

Tanggal Terbit : 14 Juli 2021
Media : journallampung.com
Tautan : <https://www.journallampung.com/index.php/2021/07/14/preventif-dengan-game-online/>

Belanja Sayur Mudah Tanpa Keluar Rumah

Rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan terutama untuk kalangan ibu-ibu adalah pergi ke pasar walaupun hanya untuk berbelanja membeli sayuran. Pasar yang menjadi tempat penyedia kebutuhan pokok dan sumber dari keramaian seringkali juga merupakan tempat penyebaran virus. Rasa was-was muncul tak terhindarkan.

Tak terpikir sebelumnya, kota dengan semboyan Ragom Gawi menjadi kota dengan penerapan PPKM level 4. Kasus Covid19 yang kian tinggi dari hari ke hari dan edaran walikota untuk membatasi diri berkegiatan membuat khawatir untuk bepergian kemana-mana dan memaksa untuk tetap bertahan di rumah.

Gaya hidup masyarakat sekarang yang sudah bergeser dari offline menjadi online, lebih memilih untuk menggunakan smartphone tidak terbatas hanya sekedar untuk berkomunikasi. Memanfaatkan aplikasi layanan belanja online khususnya sayuran dan pelengkapya bisa menjadi pilihan. Munculnya berbagai aplikasi ini juga memberikan dukungan pada aturan untuk tetap di rumah.

Aplikasi layanan belanja online dengan cakupan ragam sayur mayur, lauk, buah-buahan, maupun bumbu-bumbuan pun bermunculan. Platform ini tersedia di google playstore dan bisa diakses dengan mudah pakai banget. Supermarket maupun pasar pun juga sudah ada yang memberikan layanan belanja online. Kualitas tidak perlu dikhawatirkan, tentu sudah terjamin kesegarannya. Konsumen juga dimanjakan dengan kemasan yang tidak hanya manis tapi tentu juga rapi dan bersih. Aplikasi yang sederhana dan mobile friendly juga mempermudah dalam bertransaksi. Senangnya lagi, belanjaan langsung tiba di rumah.

Bagaimana dengan prospek keberadaan aplikasi ini? Tentunya menjanjikan seiring dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup masyarakat saat ini. Komoditi yang dijual pun juga merupakan kebutuhan sehari-hari dan setiap waktu dibutuhkan. Data BPS mencatat untuk pengeluaran masyarakat terutama bahan makanan. Melihat dari data yang ada, persentase pengeluaran perkapita sebulan di Kota Bandar Lampung untuk komoditas bahan makanan 44,65 persen di tahun 2020 dan pengeluaran untuk sayuran sendiri sebesar 3,62 persen. Angka ini tak berbeda jauh dengan pengeluaran untuk ikan yaitu 4,14 persen dan 3,07 persen untuk telur dan susu.

Pertimbangan besar kaum ibu untuk berbelanja pastilah dari sisi harga. Berbelanja dengan aplikasi, harga juga terjangkau, tidak kalah dengan harga pasar. Beberapa periode juga dilengkapi dengan promo. Tambahan biaya ongkos kirim yang hanya menjadi perbedaan.

Namun, dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan dalam berbelanja online ini, kita sebagai konsumen tetaplah harus berhati-hati. Bijak dalam memilih aplikasi. Pilihlah aplikasi dengan rekomendasi positif, memberikan harga yang jujur, dan barang-barang yang ditawarkan bervariasi dan tentu saja terjaga kesegarannya. Metode pembayaran yang mudah dan tentunya menyediakan promo menarik.

Pemerintah di sisi lain harapannya juga mampu mendorong digitalisasi UMKM termasuk usaha berbasis mobile apps. Kebijakan ini bisa jadi sebagai kunci pemulihan ekonomi dengan pengembangan ekonomi digital. Perlindungan terhadap konsumen juga sangat dibutuhkan terutama untuk keamanan dan kenyamanan.

Mau coba berbelanja sayuran dengan hanya sentuhan jari?

Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/rie-sya/belanja-sayur-mudah-tanpa-keluar-rumah-1wGwV5nD7II/full>

<https://lampung.bps.go.id>



Bayu Juniardi, S.E.
Statistisi Ahli Pertama
BPS Provinsi Lampung

Bonus Demografi di Kala Pandemi

Kehadiran pandemi Covid-19 di Lampung tidak menghalangi jalannya Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Ini dibuktikan dengan telah dirilisnya angka hasil Sensus Penduduk pada 21 Januari 2021 yang lalu oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Penduduk Lampung berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebanyak 9,01 juta jiwa. Komposisi penduduk laki-laki sebesar 51,25 persen (4,62 juta jiwa) dan penduduk perempuan sebesar 48,75 persen (4,39 juta jiwa). Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Lampung berdasarkan hasil SP2020 (1.460,05 ribu jiwa), diikuti Kota Bandar Lampung (1.166,07 ribu jiwa), dan Kabupaten Lampung Timur (1.110,34 ribu jiwa) dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga.

Selain itu, hajatan rutin sepuluh tahun sekali ini juga memberikan informasi bahwa mayoritas penduduk Lampung didominasi oleh generasi Z, generasi milenial dan generasi X. Penduduk generasi Z (perkiraan usia 8-23 tahun) sebesar 27,80 persen. Penduduk generasi milenial (perkiraan usia 24-39 tahun) sebesar 26,54 persen. Sedangkan penduduk generasi X (perkiraan usia 40-55 tahun) sebesar 21,59 persen. Pengelompokan tersebut diungkapkan oleh William H. Frey, *Analysis of Census Bureau Estimation* (25 June 2020). Seluruh generasi milenial dan generasi X merupakan penduduk yang berada pada usia produktif di tahun 2020. Sebagian generasi Z merupakan penduduk usia produktif, dan sekitar 7 tahun lagi seluruh generasi Z berada pada usia produktif.

Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Lampung berdasarkan hasil SP2020 adalah sebesar 70,31 persen. Hal ini menandakan bahwa Lampung berada dalam masa bonus demografi. Ini merupakan kesempatan yang langka. Proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Lampung akan menggerakkan roda perekonomian dan berujung pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Impian mencapai masyarakat Lampung sejahtera dengan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi akan berjalan lancar jika terpenuhi dua asumsi berikut. Asumsi pertama, dominansi penduduk usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut. Asumsi kedua yang tidak kalah pentingnya adalah, banyaknya penduduk usia produktif juga harus difasilitasi dengan tersedianya lapangan usaha yang juga berkualitas untuk menampung penduduk usia produktif tersebut.

Namun, impian tidak seindah kenyataan yang dihadapi saat ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 membawa dampak luar biasa terhadap perekonomian Lampung. Kehadiran Covid-19 mengakibatkan perekonomian Lampung setahun terakhir berkontraksi bahkan mengalami resesi. Pandemi telah meluluhlantakkan perekonomian Lampung termasuk sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang merupakan sektor dominan di Lampung selain sektor pertanian. Kelesuan ekonomi Lampung memaksa perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja.

Data ketenagakerjaan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung sebesar 4,67 persen pada Agustus 2020, meningkat 0,64 poin dibandingkan Agustus 2019. Sektor usaha dengan penurunan penduduk yang bekerja terbesar yaitu sektor industri pengolahan yang turun 2,06 poin dibandingkan Agustus 2019. Terdapat 655,9 ribu orang (10,25 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (52,6 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (12,7 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (40,9 ribu orang), penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (549,7 ribu orang).

Di tengah upaya menurunkan kasus terkonfirmasi Covid-19 dan upaya menghambat penyebaran Covid-19, upaya untuk memaksimalkan momentum bonus demografi juga harus dimanfaatkan secara optimal. Mengapa? Karena apabila jumlah penduduk produktif yang besar tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keahlian ditambah lagi dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menampung mereka, maka membuat bonus demografi akan sia-sia dan menjadi bencana demografi. Bencana demografi yang dimaksud yaitu meledaknya angka pengangguran dan pada akhirnya akan berujung pada kemiskinan.

Meningkatnya angka pengangguran pada Agustus 2020 mengindikasikan banyaknya tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja yang ada di Lampung. Hal ini sangat menyedihkan, mengingat di tahun 2020 Lampung sudah memasuki momentum bonus demografi. Berbagai kebijakan dan bantuan yang telah digulirkan pemerintah, belum mampu mengembalikan ekonomi Lampung bangkit seperti sebelum pandemi melanda. Ditambah lagi dengan kondisi ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi.

Di sisi lain, asumsi pertama untuk memanfaatkan bonus demografi juga harus diperhatikan. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif dapat dilakukan melalui pendidikan. Namun, pandemi telah membuat pendidikan tidak berjalan maksimal. Sejak akhir Maret 2020 hingga sekarang sekolah masih ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.

Penciptaan strategi pembelajaran yang efektif menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Generasi muda Lampung harus dibekali dengan keterampilan teknis, soft skill, penguasaan teknologi dan kemampuan berwirausaha. Sehingga mampu menciptakan generasi yang siap kerja, cerdas, berdaya saing, berkarakter dan produktif agar mampu berperan aktif di pasar kerja pada masa pandemi saat ini. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pendidikan/pelatihan kepada generasi X dan generasi milenial agar mereka dapat menciptakan lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

Harapan dan keyakinan berakhirnya pandemi tetap akan selalu ada. Jika nanti pandemi berakhir, keadaan tidak akan kembali seperti semula. Namun peluang bonus demografi tidak akan terulang kembali. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan agar bonus demografi dapat dimaksimalkan menuju masyarakat Lampung sejahtera di masa yang akan datang.

Tanggal Terbit : 4 Februari 2021
Media : teraslampung.com
Tautan : <https://www.teraslampung.com/bonus-demografi-di-kala-pandemi/>

<https://lampung.bps.go.id>



Delvi Rutania Prama, S.Si.
Statistisi Ahli Pertama
BPS Kota Metro

Peran Pemerintah dan Keluarga dalam Pelestarian Bahasa Ibu

Sejak 17 November 1999, UNESCO telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai hari Bahasa Ibu Internasional. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir untuk digunakan berinteraksi dalam keluarga maupun masyarakat. Bahasa menjadi alat komunikasi seluruh manusia, baik antar suku maupun bangsa. Selain itu, ragam dialek dan vokal dari bahasa ibu merupakan ciri dan identitas suku dan bangsa tersebut.

Kondisi sekarang ini bahasa ibu atau bahasa daerah semakin hari menjadi dialek sosial yang langka ditemukan. Di tempat-tempat umum, masyarakat membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa nasional dan bahasa asing. Bahkan beberapa keluarga, saat ini banyak membiasakan percakapan sehari-hari tidak lagi menggunakan bahasa ibu. Akibat dari semua itu, banyak generasi muda tidak mengenal dan tidak bisa melafalkan bahasa daerah tempatnya berasal.

Generasi muda yang tidak mengenal bahasa ibu, beberapa memang disebabkan tidak adanya didikan orangtua di rumah. Orangtua tidak mengajak anaknya untuk membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Stigma yang berkembang beranggapan menggunakan bahasa daerah merupakan bentuk kemunduran dan ketidaksiapan dalam persaingan global. Sebab lain dari faktor orangtua dikarenakan kawin campur, secara otomatis bahasa yang digunakan dalam keseharian di rumah merupakan bahasa nasional.

Penyebab lain gagapnya generasi muda dalam melafalkan bahasa ibu dikarenakan gengsi, terlebih ketika mereka di perkotaan. Mereka beranggapan memakai bahasa ibu sudah kuno atau ketinggalan Zaman. Dalam pergaulan sehari-hari, baik pemuda di perantauan atau tidak, banyak yang lebih memilih menggunakan bahasa gaul yang kekinian. Lambat laun bahasa gaul tersebut terdengar familier seperti, kepo, bingit, cemungut, bokap, nyokap, pansos dsb.

Kondisi Bahasa Ibu Kini

Berdasarkan data kajian yang dilakukan Badan Bahasa sejak tahun 2011-2019, bahwa saat ini terdapat 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Sebanyak 11 bahasa daerah diantaranya bahkan sudah punah. Data hasil Sensus penduduk Tahun 2010 menunjukkan 79,5 persen penduduk Indonesia

usia 5 tahun menggunakan bahasa ibu dalam kesehariannya, tentunya harapan penggunaan bahasa ibu dikalangan usia muda bisa lebih besar lagi, karena dari 270,20 Juta jiwa hasil sensus penduduk 2020, 27,94 persen nya adalah usia 8-23 tahun.

Menurut Leanne Hinton, revitalisasi bahasa merupakan upaya untuk mengembalikan bahasa yang terancam punah, terlebih masyarakat sekarang ini yang telah mengalami penurunan pengguna bahasa. Tugas utama dari revitalisasi bahasa yakni, mengajarkan bahasa kepada orang yang tidak cakap berbahasa, dan membuat pelajar bahasa serta orang yang telah mengetahui bahasa agar menggunakannya dalam situasi apapun.

Upaya konkret yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat meliputi peran keluarga/ orangtua dan lingkungan. Pola pendidikan bahasa yang bisa diterapkan oleh orangtua, dengan membiasakan komunikasi di rumah melalui bahasa ibu. Semisal keluarga di Lampung, orangtua dapat mengajak anaknya untuk berkomunikasi dengan bahasa Lampung baik dalam keseharian maupun acara tertentu.

Peran Pemerintah

Peran strategis selanjutnya berada pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain melalui pendokumentasian bahasa daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melahirkan dua kebijakan edukatif untuk menjaga keutuhan bahasa ibu. Pertama, dengan mengeluarkan kebijakan hari wajib berbahasa daerah sepekan sekali di lembaga pendidikan, berlaku dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Kondisi saat ini di daerah, kurikulum bahasa daerah dilaksanakan sebanyak seminggu sekali dalam kegiatan pembelajaran.

Kedua, menciptakan kreasi visual seperti, film kartun, film dokumenter maupun film pendek berbahasa daerah yang dapat ditayangkan melalui televisi atau media sosial. Sebab, saat ini banyak dari generasi muda yang tertarik dengan program teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Dengan memanfaatkan komunikasi visual, bahasa daerah menjadi lebih dekat dan komunikatif. Internalisasi nilai- nilai lokal bahasa daerah turut menjadi sangat efektif. Dengan begitu, harapan agar generasi muda menguasai trigatra bahasa (bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa asing), dapat terwujud dengan baik.

Pada saat ini sebagai wujud pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pendidikan dalam pelestarian, pembinaan dan pengembangan budaya, bahasa dan aksara Lampung, Gubernur Lampung memberikan rekomendasi dan dukungan penuh dalam Pembukaan Program Studi Strata I (S1) Pendidikan Bahasa Lampung pada FKIP Unila. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pun menyetujui dibukanya Prodi S1 pendidikan Bahasa Lampung di Unila.

Menghidupkan bahasa daerah dalam lomba-lomba, seperti lomba pidato bahasa daerah, lomba menulis puisi bahasa daerah dan lain-lain merupakan salah satu kegiatan untuk melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu agar tidak punah. Atau dengan menggiatkan acara TV lokal yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama.

Menggunakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing memang tidak ada salahnya karena tuntutan dunia kerja yang semakin berdaya saing global dan mengharuskan menguasai bahasa asing. Namun, bukan berarti kita melupakan bahasa daerah yang notabennya merupakan bahasa sendiri. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa mencintai dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari disamping bahasa nasional dan bahasa asing.

Tanggal Terbit : 19 Februari 2021
Media : teraslampung.com
Tautan : <https://www.teraslampung.com/peran-pemerintah-dan-keluarga-dalam-pelestarian-bahasa-ibu/>

<https://lampung.bps.go.id>



Dhyantanu Harsa, S.S.T., M.M.
Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Lampung

Menjamin Tata Kelola Beras

Isu impor beras berhembus kencang dan mendapatkan penolakan dari hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga petinggi dinegeri ini. Demi menjaga pasokan dan stabilitas harga beras Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berkeras untuk tetap melakukan impor beras.. Jika melihat potensi produksi padi di Indonesia pada Januari - April tahun 2021 yang dikeluarkan BPS diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84% jika dibandingkan dengan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

Dengan potensi sebesar itu mampu untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa sampai bulan Juni 2021. Dengan asumsi kebutuhan beras perkapita konsumsi beras langsung dan tidak langsung sebesar 111,58 kg per kapita per tahun atau 2,5 juta ton beras sebulan. Jika berkaca pada produksi padi ditahun 2020 dengan capaian 31,33 juta ton beras maka dapat diasumsikan pada tahun ini kita bisa melakukan Ekspor Beras jika di bulan Januari- April saja sudah meningkat 3,08 juta ton beras.

Buwas mengatakan untuk menghabiskan sisa impor tahun 2018 BULOG harus berfikir keras, karena tidak mudah untuk mengeluarkan 275.811 ton dari total 1.785.450 ton dan 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu. Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun karena program beras untuk keluarga sejahter (Rastra) beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada pertengahan tahun 2019. Jenis beras yang diimpor kebanyakan pera sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia biasanya mengkonsumsi beras pulen. Bulog menyalurkan beras itu harus dicampur dengan beras dalam negeri.

Ombudsmen menduga adanya kemungkinan cacat administrasi atau maladministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Kemenko Perekonomian diminta untuk melaksanakan rakortas guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Bulog setelah panen raya 2021. Permintaan yang sangat brilian dari Ombudsmen, sudah seharusnya dipertimbangkan dengan matang dan menjadi bahan evaluasi kebijakan impor beras tahun ini.

Presiden Jokowi bertindak cepat dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021. Pernyataan kepala negara ini mampu meredakan keresahan petani dan menghentikan gonjang ganjing isu impor beras. Nota kesepahaman yang dibuat pemerintah dengan Thailand dan Vietnam dalam impor beras masih mengundang tanya apakah impor beras akan dilakukan setelah bulan juni?

Untuk mengukur potensi produksi padi sudah mampu dilakukan oleh BPS dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Metode ini dilaksanakan pada 7 hari terakhir setiap bulannya untuk memperoleh fase tumbuh padi mulai dari persiapan lahan, fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahan puso/rusak, lahan sawah bukan padi, atau lahan bukan sawah sehingga mampu menghitung potensi produksi padi untuk 3 bulan kedepan yang bisa dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi. Dengan bermodalkan data produksi beras tersebut pemerintah sudah memiliki basis data untuk melakukan perencanaan tata kelola beras yang lebih baik. Kebijakan yang didasari data yang akurat seperti nahkoda yang memiliki kompas. Bisa dipastikan keputusan yang diambil tidak akan salah arah apalagi berlawanan arah.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Bulog untuk menyerap sebanyak – banyaknya gabah di petani. Instruksi harus disambut dan dilakukan secara masif oleh Bulog karena selain menjamin ketersediaan beras juga akan mampu mendongkrak harga gabah dipetani yang biasanya setiap panen raya harga gabah berada di bawah HPP sebesar 4.200 rupiah.

Penyerapan padi oleh BULOG pada panen raya menjadi kunci terjaminnya ketersediaan beras di negeri ini. Dengan bermodalkan data luas panen dan potensi panen yang dimiliki oleh BPS dan Informasi pendukung dari Kementerian Pertanian tentu akan memudahkan Bulog menyerap gabah di panen raya kali ini. Mari bersinergi mewujudkan tata kelola beras yang baik sehingga ketersediaan beras terjamin dan harga beras di tingkat petani sesuai dengan harapan.

Tanggal Terbit : 8 April 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/menjamin-tata-kelola-beras.html>

Menjaga Harga Beras

Panen raya padi tahun ini di Provinsi Lampung diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret sampai April 2021. Waktu yang sangat dinantikan oleh petani untuk menuai hasil panennya. Namun selama ini harga gabah yang diterima petani jika panen raya akan berada dibawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020. Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di petani dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 10% sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg). Sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas sama di penggilingan seharga Rp 4.250 per kilogram. Adapun, harga pembelian gabah kering giling di penggilingan dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 3% sebesar Rp 5.250 per kilogram.

Awal April yang lalu BPS Lampung merilis rata-rata harga GKP di tingkat petani selama Maret 2021 turun 14,39 persen dari Rp. 4.576,09 per kg menjadi Rp. 3.917,57 per kg jika dibandingkan bulan lalu. Dengan kualitas yang sama, harga gabah di tingkat penggilingan juga mengalami penurunan sebesar 13,82 persen dari Rp. 4.672,61 per kg menjadi Rp. 4.027,03 per kg. Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp. 4.800,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang terdapat di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Sedangkan harga gabah terendah mencapai Rp. 3.700,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang dan Inpari32 terdapat di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Turunnya harga gabah ditingkat petani disebabkan turunnya kualitas gabah karena kadar air yang cukup tinggi. Selain itu produksi gabah yang melimpah juga membuat harga gabah tak mampu bertahan.

Kadar air gabah tinggi saat panen raya satu alasan mengapa harga gabah rendah, Umumnya petani di Indonesia masih melakukan pengeringan dengan menjemur padi secara tradisional dan sederhana. Dengan cara di jemur di pinggir jalan atau halaman rumahnya dengan beralaskan terpal, itu sangat merepotkan tapi petani tak ada pilihan. Upaya pengeringan gabah dipinggir jalan dilakukan karena tidak tersedianya lahan untuk melakukan penjemuran. Apa yang sudah dilakukan pemerintah agar kadar air gabah saat panen raya tidak tinggi? Penangan pasca panen terutama saat panen raya perlu campur tangan pemerintah dalam menyediakan sarana dan pra sarana agar mutu gabah dalam kondisi baik.

Turunnya harga gabah ditingkat petani pada bulan Maret hingga berada di bawah HPP selain mutu gabah yang turun juga sosialisasi HPP terbaru belum sampai ke seluruh petani di Lampung. Solusi yang bisa diambil untuk meningkatkan mutu gabah dengan cara menyediakan alat pengering padi di setiap kelompok tani, selain itu diperlukan juga menyediakan lantai jemur yang memadai sesuai dengan kapasitas produksi padi di masing-masing daerah. Dengan menyediakan alat tersebut dipastikan kadar air gabah saat panen dibawah 25 % dan mutu gabah pun meningkat. Untuk meningkatkan mutu gabah perlu diperhatikan varietas yang ditanam oleh petani, penyuluh Pertanian di setiap daerah harus bekerja lebih keras untuk mensosialisasikan varietas yang tepat agar menghasilkan produksi yang melimpah dengan mutu gabah yang baik.

Sosialisasi HPP terbaru seharusnya sudah dilakukan dari tahun lalu sehingga sekarang semua petani sudah mengetahui akan menjual gabah hasil panennya tidak dibawah HPP. Penyerapan gabah saat panen raya hal mutlak yang harus dilakukan untuk menjamin harga gabah ditingkat petani.

Permasalahan lainnya sebagian petani kita untuk membeli bibit, pupuk dan sarana penunjang lainnya sudah meminjam dari BOS (pedagang pengumpul) yang memberikan modal kepada petani dengan perjanjian hasil panennya harus dijual kepada BOS, hal tersebut membelenggu petani kita. Program Kartu Petani Berjaya yang digelontorkan Gubernur seharusnya sudah mengatasi permasalahan ini. Pendataan semua petani padi tentunya hal mendasar yang harus dilakukan agar program tersebut tepat sasaran dan tepat guna. Bantuan modal untuk petani padi bisa dilakukan oleh koperasi ataupun bank pemerintah agar tidak ada lagi petani yang terbelenggu.

Tanggal Terbit : 12 April 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/stat-produksi/menjaga-harga-gabah-1vXPMI9OPm7>

Harga Gabah Kembali Pasrah

Harga gabah lagi dan lagi berada di bawah Harga Pokok Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan pemerintah setahun yang lalu, mengapa petani mau menjual gabahnya di bawah HPP? Ternyata HPP yang baru untuk Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di petani dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 10% sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg) belum sampai ke telinga petani.

Awal Mei yang lalu BPS Lampung merilis rata-rata harga gabah di petani dan di penggilingan mengalami penurunan pada April 2021. Penurunan rata-rata harga kelompok kualitas GKP di tingkat petani sebesar 7,54 persen dari Rp. 3.917,57 per kg pada Maret 2021 menjadi Rp. 3.622,35 per kg dan di tingkat penggilingan turun 7,26 persen dari Rp. 4.027,03 per kg pada Maret 2021 menjadi Rp. 3.734,47 per kg. Untuk kelompok gabah kualitas GKG di tingkat petani juga turun 8,93 persen dan di tingkat penggilingan juga mengalami penurunan sebesar 8,39 persen. Harga gabah tertinggi di tingkat petani hanya berkisar Rp. 4.000,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas IR64 terdapat di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan harga gabah terendah mencapai Rp. 3.300,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Muncul terdapat di Kecamatan yang sama.

Harga gabah ditingkat petani maupun ditingkat penggilingan yang terjadi di Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan anjlok hingga berada di bawah HPP gabah, hal ini disebabkan turunnya produksi dan kualitas gabah hasil panen di bulan April yang disebabkan kurangnya pupuk saat fase tanam padi vegetative akhir di bulan Februari. Memang tahun ini alokasi pupuk subsidi untuk Lampung lebih rendah dibandingkan pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Lampung hanya mendapat alokasi 543.707 ton pupuk bersubsidi dari kebutuhan 1.457.561 ton. Jumlah itu hanya 37 persen dari kebutuhan pupuk petani, diperparah masalah penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan dengan mulus membuat kelangkaan pupuk terjadi di Lampung. Bulan April juga merupakan saat puncak panen raya sehingga produksi gabah melimpah di bumi ruwai jurai membuat daya tawar gabah semakin rendah.

Turunnya harga gabah pada puncak panen raya merupakan masalah yang terus terjadi selama ini. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menstabilkan harga gabah agar mampu bertahan di atas HPP sepanjang tahun. Gagasan untuk mengatur waktu tanam padi sehingga panen dapat diatur setiap bulannya selama setahun dengan besar produksi yang relatif sama muncul ke

permukaan. Gagasan yang patut dicoba walaupun mungkin sulit untuk diwujudkan jika sarana dan prasarana belum memadai. Saluran irigasi yang belum menyentuh semua lahan sawah menjadi kendala besar. Karena mustahil dapat menanam padi tanpa tercukupinya pasokan air, sedangkan lahan sawah yang ada banyak sekali yang hanya mengandalkan dari turunnya hujan. Sudah sewajarnya jika pada musim penghujan tiba pada bulan Desember sampai Februari petani menggarap sawahnya untuk mulai menanam padi dan bisa diperkirakan puncak panen padi akan terjadi di bulan Maret sampai Mei setiap tahunnya.

Penyerapan gabah petani saat panen raya seperti ini belum masif dilakukan oleh pemerintah, petani hanya bisa pasrah menjual hasil panen dengan harga rendah karena jika tidak terjual kualitas gabah akan semakin turun bahkan rusak. Peran pemerintah untuk mensejahterakan petani salah satu caranya adalah menjamin harga gabah di petani minimal sama dengan HPP yang telah ditetapkan setiap kali panen. Seperti ini Bulog tidak mampu melakukannya sendiri, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan penyerapan gabah hasil panen petani terutama di waktu panen raya agar harga yang diterima petani sesuai dengan harapan.

Tanggal Terbit : 24 Mei 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/harga-gabah-kembali-pasrah.html>

Harapan Baru Petani Lampung

Presiden Joko Widodo telah meresmikan bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 2 September 2021 lalu. Bendungan yang menelan biaya 1,78 triliun ini memiliki kapasitas menampung air 68 juta meter kubik dan diperkirakan akan mampu mengaliri 72.000 hektar area pesawahan sekaligus dapat mereduksi banjir. Seluruh area pesawahan di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Metro dipastikan tercukupi kebutuhan airnya. Merujuk pada Keputusan Kementerian ATR/BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 luas baku sawah di empat kabupaten tersebut baru 68.868,69 hektar, masih dimungkinkan pengembangan saluran irigasi ke kabupaten lainnya agar kapasitas air yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi harus menjadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Air tidak akan mengalir hingga ke area persawahan tanpa didukung sistem irigasi yang tertata dengan baik. Kondisi jaringan irigasi sekunder, tersier dan kwarter banyak ditemui dalam kondisi rusak. Ini menjadi pekerjaan rumah yang segera harus dibereskan agar bendungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani yang mengusahakan tanaman di area pesawahan.

Bendungan Way Sekampung dengan luas genangan 800 hektar ini akan dimanfaatkan juga sebagai destinasi wisata dan pembangkit listrik dengan kapasitas 5,4 megawatt. Dengan kapasitas sebesar itu, pembangkit listrik dari bendungan Way Sekampung akan menjadi andalan suplai aliran listrik di Provinsi Lampung. Aset negara yang cukup besar ini harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama. Biaya perawatan harus disediakan untuk menjamin bendungan ini dapat berfungsi dengan baik.

Dengan rampungnya pembangunan bendungan Way Sekampung, cita-cita menjadikan Lampung sebagai lokomotif pertanian di Indonesia sudah semakin nyata. Jika Lampung berhasil menjadi lokomotif pertanian tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan berbekalkan kecukupan air, pemerintah dapat bekerjasama dengan petani dalam menentukan waktu tanam dan jenis komoditas yang akan ditanam di area persawahan. Tidak menutup kemungkinan aliran irigasi akan merambah ke daerah peladangan yang akan ditanami komoditas ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Keinginan Gubernur Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi yang dipimpinnya tidak cukup dengan membangun infrastruktur saja.

Pendampingan kepada petani saat mulai menanam sampai panen juga menjamin produksi hasil panennya dapat dibeli dengan harga yang sepadan dengan jerih payah yang dikeluarkan sangat diperlukan. Ketersediaan pupuk saat dibutuhkan juga harus terpenuhi, berantas semua mata rantai yang dapat menimbulkan kelangkaan pupuk. Petani juga diberikan bimbingan agar mampu mengatur, menyimpan, dan mengolah padi menjadi beras, mengolah jagung menjadi jagung pipilan kering yang berkualitas super. Kelompok tani juga harus didorong untuk membangun industri pengolahan padi dan jagung secara mandiri.

Kebijakan Stabilitas harga komoditas padi sangat dibutuhkan. Selama ini, petani kerap merugi karena saat panen harga jual padi berada dibawah Harga Pokok Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan pemerintah, sementara harga benih dan pupuk cenderung naik. Turunnya harga gabah pada puncak panen raya merupakan masalah yang terus terjadi selama ini. Pada bulan Maret 2021 BPS Lampung mencatat masih ditemui harga gabah Rp. 3.700,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang dan Inpari32 terdapat di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Selama Bulan April hingga Agustus 2021 BPS Lampung kembali mencatat harga gabah berada pada kisaran Rp. 3.300 sampai Rp. 4.050 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Muncul dan Ciherang terdapat di Kecamatan Palas, Sragi dan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Rendahnya harga gabah ditingkat petani disebabkan kualitas gabah hasil panen tidak memenuhi standar pembelian Bulog. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gabah dengan menyediakan mesin pengering gabah di tingkat desa sentra padi.

Perluasan area pesawahan yang ditanami padi organik perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebagai komoditas unggulan petani padi di Lampung. Di masa pandemi covid-19 masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan makanan yang sehat untuk keluarganya. Beras organik menjadi pilihan yang sangat bijak untuk mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan dari dampak penggunaan bahan kimia dan pestisida yang sudah masif digunakan petani padi. Kementerian Pertanian menyebutkan sentra padi organik saat ini masih spot-spot kecil dan belum di hamparan luas. Sentra padi organik terutama di wilayah Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Utara pada tahun 2019 baru ada 215 hektar, sedangkan pangsa pasar beras organik semakin meningkat. Pengembangan padi organik di Provinsi Lampung tentu masih terbuka lebar. Dengan bermodalkan air irigasi dari bendungan Way Sekampung yang berlimpah juga dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten sangat mungkin menjadikan Lampung sebagai lumbung beras organik nasional. Dukungan penuh dari pemerintah kepada

petani dengan memberikan penyuluhan yang intensif dan pendampingan cara mengelola padi organik kepada petani menjadi kunci keberhasilan meningkatnya produksi padi organik di Provinsi Lampung.

Tanggal Terbit : 21 Oktober 2021
Media : infra-merah.com
Tautan : <https://infra-merah.com/2021/10/21/harapan-baru-petani-lampung/>

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Erika Santi, S.T., M.Si.
Statistisi Ahli Muda
BPS Kota Metro

Menuju Petani Lampung Berjaya

Gubernur Lampung menerima penghargaan di bidang pertanian yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin pada hari Senin 13 September 2021. Penghargaan dimaksud adalah peringkat pertama kategori provinsi dengan peningkatan produksi padi tertinggi tahun 2019-2020. Provinsi Lampung membukukan produksi padi sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak 22,47 persen dari capaian tahun 2019.

Namun capaian gemilang tersebut menjadi anomali jika dibandingkan dengan kesejahteraan petani. Pada Juli 2021 BPS Provinsi Lampung merilis bahwa kemiskinan di Lampung kondisi Maret 2021 tercatat sebesar 12,62 persen atau setara dengan 1,08 juta jiwa. Angka kemiskinan ini terkonsentrasi di pedesaan dengan jumlah 14,18 persen, terpaut cukup jauh dengan di perkotaan yang berjumlah 9,29 persen.

BPS mencatat penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2016-2020 di Provinsi Lampung berturut-turut sebesar 39,41 persen, 38,20 persen, 43,04 persen, 32,92 persen, dan 35,43 persen. Jadi selama lima tahun terakhir rata-rata ada sebanyak 37,8 persen penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Dengan kata lain orang-orang miskin di Lampung sebagian besar adalah petani.

Pertanian Tulang Punggung Ekonomi

Pada tahun 2016-2020, struktur perekonomian Provinsi Lampung didominasi oleh tiga sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor terbesar dengan kontribusi rata-rata 30,19 persen, berikutnya Industri Pengolahan rata-rata sebesar 19,33 persen dan Perdagangan rata-rata sebesar 11,19 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi andil utama pada struktur ekonomi Lampung di tahun 2020 yaitu sejumlah 29,90 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 28,80 persen. Dominasi sektor ini terjadi di seluruh kabupaten/kota kecuali di Bandar Lampung dan Metro dengan rata-rata sebesar 34,06 persen. Bahkan pada tahun 2020, kontribusi lapangan usaha ini di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data-data ini dapat diketahui bahwa pertanian adalah tulang punggung ekonomi Lampung.

Pada masa pandemi Covid-19, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan teruji tetap mampu bertahan. Bahkan berdasarkan rilis BPS Provinsi Lampung pada Agustus 2021, ekonomi Lampung pada Triwulan-II 2021 tumbuh sebesar 6,69 persen. Angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera. Konstruksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada Triwulan -II 2021 atas dasar harga berlaku tertinggi disumbang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 29.046,05 miliar rupiah.

Kondisi Petani Lampung

Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 1.340.285 dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4.734.144 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir sebagian penduduk Lampung bertumpu pada pertanian. Jumlah RTUP tertinggi berada pada sub sektor perkebunan yaitu 775.124 rumah tangga.

Bila dilihat dari kepemilikan lahan, jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem; penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar adalah 36,8 persen. Angka ini meningkat 10,26 persen dibanding tahun 2013. Fenomena ini menunjukkan bahwa petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar terus bertambah. Selain itu, 96,70 persen rumah tangga pertanian tidak punya pembukuan usahanya.

Jumlah petani di Lampung adalah 1.577.819 orang. Dari segi pendidikan, 81,09 persen petani ini berpendidikan SMP kebawah. Sementara itu petani yang menggunakan internet hanya 14,1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas petani di Lampung belum memanfaatkan teknologi informasi dalam usahanya. Keadaan ini membuat petani sulit mengakses perkembangan teknologi pertanian dan pasar hasil pertanian.

Strategi Petani Berjaya

Kita patut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menggulirkan program Kartu Tani Berjaya sebagai bentuk perhatian kepada para petani di Lampung. Tentu saja, besar harapan kita agar program ini memberi pengaruh positif pada kesejahteraan petani.

Ada beberapa hal yang penulis tawarkan untuk menuju petani Lampung berjaya. Pertama, data pertanian terintegrasi. Informasi yang sah diperlukan untuk pengambil kebijakan agar keputusan yang diambil sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan keinginan petani. Pemerintah Provinsi Lampung dapat menggandeng BPS Provinsi Lampung untuk membenahi

integrasi data pertanian. Mimpinya semua data pertanian, baik yang diperoleh dari sensus dan survei BPS maupun yang dimiliki Dinas Pertanian sampai dengan level kabupaten/kota dapat terintegrasi dalam sebuah sistem informasi.

Data-data pertanian seperti data petani, lahan, produksi, struktur ongkos, ketersediaan bibit, pupuk, sampai dengan pasar produk pertanian harapannya bisa diakses dengan mudah, baik oleh pengambil kebijakan, petani maupun konsumen produk pertanian. Pada sistem informasi ini juga, petani bisa menyampaikan apa yang dibutuhkannya. Sampai pada tahap ini perlu kerja keras, mengingat petani yang menggunakan internet baru 14,13 persen.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah menghubungkan petani dengan dunia usaha yang memerlukan bahan baku pertanian. Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi learning center untuk hal ini. Sebagai contoh di Wonogiri ada Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejadad. BUMP ini bahkan bisa mengekspor hasil pertaniannya ke luar negeri. Contoh lainnya adalah Kabupaten Magelang memasok bahan baku pertanian ke Indofood secara kontinu. Atau juga bisa meniru Kabupaten Sragen yang mengekspor produk pertaniannya ke Timur Tengah. Ketika pemerintah memfasilitasi petani dengan dunia usaha yang memerlukan produk pertanian, dengan sendirinya akan mengurangi mata rantai distribusi. Hal ini tentu akan memberi andil positif dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Bank Tani atau Kredit Usaha Pertanian (KUP) adalah hal lain yang bisa digagas. Tentu saja kredit ini tanpa bunga dengan durasi waktu dan cicilan pengembalian yang tidak memberatkan petani. KUP ini akan menghindarkan petani dari tengkulak, sehingga petani berjaya yang dicita-citakan dapat terwujud.

Tanggal Terbit : 30 November 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/opini-menuju-petani-lampung-berjaya.html>

<https://lampung.bps.go.id>



Febiyana Qomariyah, S.S.T., M.M.
Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Lampung

Pelaku Usaha Lampung, Berat Melangkah di Tengah Wabah

Lebih dari setahun sudah Pandemi Covid-19 menghampiri seluruh wilayah di dunia. Selama beberapa bulan terakhir kita diharuskan hidup berdampingan dengan virus ini. Covid-19 tidak hanya merengut banyak nyawa, namun juga telah memporakporandakan perekonomian nasional dan Lampung khususnya. Pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan ini. Kenyataannya, pandemi masih menjadi permasalahan besar hingga saat ini. Penambahan kasus baru Covid-19 tidak hanya berdampak buruk di bidang ekonomi, namun juga bidang kesehatan, sosial dan budaya.

Ekonomi Lampung Selama Pandemi Covid-19

Akibat pandemi Covid-19, ekonomi Lampung yang sebelumnya stabil di kisaran 5 persen selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,67 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung sudah terlihat sejak triwulan I-2020. Ekonomi Lampung triwulan I-2020 tumbuh sebesar 1,73 persen, melemah dibanding triwulan I-2019 (y-on-y) yang tumbuh 5,21 persen. Pada masa ini, pandemi Covid-19 baru terdeteksi di Lampung. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang berlakukan pemerintah Provinsi Lampung semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi Lampung.

Memasuki triwulan II-2020, penyebaran Covid-19 secara nasional semakin bertambah parah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah membawa dampak buruk terhadap ekonomi Lampung. Kontraksi ekonomi Lampung di triwulan II-2020 sebesar 3,57 persen (y-on-y) atau 0,56 persen (q-to-q) membuat ekonomi Lampung kian terpuruk. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,22 persen (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 13,85 persen (y-on-y) dan ekspor barang dan jasa sebesar 9,96 persen (y-on-y).

Keterpurukan ekonomi Lampung yang terjadi hingga pertengahan tahun 2020 membawa kekhawatiran di masyarakat. Ketidakpastian akan sampai kapan berakhirnya pandemi, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ancaman akan kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dihindari pada saat itu.

Untuk mencegah situasi bertambah parah, beberapa daerah di Indonesia mulai memberlakukan kebijakan relaksasi pembatasan sosial. Berbagai bantuan mulai disalurkan ke masyarakat, termasuk bantuan yang diterima oleh masyarakat Lampung. Hal ini berdampak positif pada pemulihan ekonomi Lampung di triwulan III-2020. Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III-2020 membaik di level -2,41 persen (y-on-y).

Berbagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat semakin membawa dampak positif terhadap ekonomi Lampung di akhir tahun 2020. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang semakin membaik di level -2,26 persen (y-on-y) pada triwulan IV-2020. Meskipun masih terjadi kontraksi ekonomi, namun kontraksi ekonomi yang terjadi tidak sedalam triwulan sebelumnya. Ini mengindikasikan telah ada perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Fenomena yang sama juga terlihat pada indikator daya beli masyarakat yang tergambar pada inflasi Lampung selama tahun 2020. Mulai Januari hingga Mei 2020, trend inflasi Lampung mengalami penurunan yang cukup dalam. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan daya beli masyarakat Lampung hingga pertengahan tahun 2020. Bahkan selama Maret – Mei 2020, Lampung mengalami deflasi. Perbaikan daya beli masyarakat Lampung mulai tergambar dari inflasi Juni – Desember 2020, sepanjang periode ini Lampung mengalami inflasi. Hanya di September 2020 saja Lampung kembali mengalami deflasi. Sepanjang tahun 2020 inflasi Lampung tercatat sebesar 2,00 persen (p-to-p).

Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Usaha Lampung

Penurunan daya beli masyarakat Lampung berpengaruh terhadap dunia usaha di Lampung. Kelesuan perekonomian memaksa perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja. Data ketenagakerjaan yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung Agustus 2020 sebesar 4,67 persen, meningkat 0,64 poin dibandingkan Agustus 2019.

Terdapat 655,9 ribu orang (10,25 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (52,6 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (12,7 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (40,9 ribu orang), penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (549,7 ribu orang). Meningkatnya jumlah pengangguran di Lampung mengindikasikan semakin banyaknya

masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 di Lampung, pekerja di sektor transportasi dan pergudangan yang paling terdampak Covid-19. Sebanyak 80 persen pekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan pendapatan akibat Covid-19.

Penurunan pendapatan juga terjadi pada pelaku usaha di Lampung. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Lampung mengemukakan bahwa secara umum 8 dari setiap 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, yaitu 82,95 persen Usaha berskala Menengah Besar (UMB) dan 82,79 persen Usaha berskala Mikro dan Kecil (UMK). Sekitar 18 persen usaha memperkirakan mampu bertahan maksimal hingga 3 bulan jika tanpa bantuan. Berbagai kendala dihadapi oleh perusahaan selama masa pandemi dan sebagai akibat dari kebijakan *social distancing*. Secara umum, 8 dari 10 perusahaan baik UMB maupun UMK cenderung mengalami penurunan permintaan karena pelanggan/klien yang juga terdampak Covid-19. Kendala yang paling banyak dihadapi oleh UMB yaitu akibat rekan bisnis mereka terdampak sangat buruk atau tidak bisa beroperasi secara normal. Sedangkan bagi UMK, kendala keuangan paling banyak dihadapi yaitu terkait pegawai dan operasional.

Di tengah kondisi pandemi, perusahaan berusaha mempertahankan operasional usahanya. Sebagian perusahaan masih beroperasi seperti saat sebelum pandemi. Untuk mendukung kebijakan *social distancing* yang ditetapkan pemerintah, perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa melakukan pengurangan jam kerja. Selain itu, perusahaan juga mengambil kebijakan untuk merumahkan tenaga kerja (tidak dibayar) dan memberhentikan pekerja dalam waktu singkat. Optimisme bahwa pandemi akan segera berakhir cenderung membuat perusahaan tidak mengambil keputusan PHK permanen. Memberhentikan pekerja dalam waktu singkat adalah pilihan yang relatif lebih baik. Meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak oleh pandemi, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan tenaga kerjanya. Sebanyak 77 dari setiap 100 perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, jumlah tenaga kerjanya cenderung tetap (tidak melakukan PHK).

Tiga sektor usaha yang paling terdampak Covid-19 di Lampung yaitu, sektor akomodasi makan dan minum (94,07 persen), sektor jasa lainnya (88,61 persen), dan sektor transportasi dan pergudangan (87,50 persen). Pelaku usaha Lampung melakukan diversifikasi usaha sebagai bentuk adaptasi usaha selama masa pandemi. Diversifikasi usaha mencakup upaya menjalankan proses bisnis seperti biasa namun ada penambahan produk, bidang usaha dan

lokasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Sebanyak 15 dari setiap 100 perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha selama masa pandemi.

Proses bisnis yang tetap berjalan di perusahaan memaksa perusahaan untuk melakukan adaptasi baru di lingkungan kerja. Dalam rangka upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus penyebaran Covid-19, pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Sebagian besar pelaku usaha telah menerapkan protokol kesehatan, meskipun juga masih terdapat sebagian yang belum menerapkan. Secara rata-rata perusahaan di wilayah kota lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan dibandingkan perusahaan di wilayah kabupaten. UMB relatif lebih patuh pada penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dari pada UMK.

Di sisi lain, internet dan teknologi informasi (TI) juga berperan sangat besar bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Pemasaran secara *online* menjadi solusi menjanjikan. Ini dilakukan sebagai dampak kebijakan *social distancing* yang menyebabkan pemasaran konvensional menjadi terbatas. Secara umum, sekitar 44,34 persen perusahaan telah menggunakan internet dan TI sebagai sarana pemasaran *online* sejak sebelum pandemi. Sekitar 6,39 persen perusahaan baru menggunakan internet dan TI untuk melakukan pemasaran *online* pada saat pandemi. Sebanyak 9 dari 10 pelaku usaha yang menggunakan internet dan TI sebagai sarana pemasaran *online* mengaku bahwa cara ini berpengaruh dalam penjualan produk mereka.

Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Hingga saat ini ancaman Covid-19 belum berakhir. Pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus di masyarakat. Hal penting dan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Lampung selain vaksinasi Covid-19 adalah menerapkan protokol kesehatan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kepercayaan dan rasa aman masyarakat sangat dibutuhkan agar roda perekonomian Lampung dapat berjalan.

Kampanye, sosialisasi dan edukasi yang tepat di masyarakat terkait manfaat dan fungsi vaksin Covid-19 perlu dilakukan, mengingat maraknya informasi yang beredar tentang bahaya vaksin yang telah disuntikan terhadap fisik seseorang. Pengelolaan vaksinasi sebaiknya dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan untuk kita hadapi bersama. Keadaan yang lebih baik di masa mendatang akan tetap menjadi harapan kita bersama.

Meskipun pandemi belum diketahui kapan akan berakhir, diperlukan optimisme pelaku usaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif di Lampung. Mitigasi rencana pengembangan usaha pasca Covid-19 pun harus mulai dilakukan para pelaku usaha agar mereka lebih siap menghadapi situasi krisis. Ini tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Lampung juga mengemukakan bahwa bantuan yang dominan diperlukan bagi UMK adalah bantuan modal usaha. Sedangkan bagi UMB, ada tiga bantuan yang paling dibutuhkan selama masa pandemi, yaitu relaksasi pembayaran pinjaman, keringanan tagihan listrik dan bantuan modal usaha.

Tanggal Terbit : 9 Februari 2021

Media : teraslampung.com

Tautan : <https://www.teraslampung.com/pelaku-usaha-di-lampung-berat-melangkah-di-tengah-wabah/>

Waspada Membeludaknya Pengangguran Terdidik

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk 9,01 juta jiwa tentu memiliki problema yang tak terhindari, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang banyak akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Bahkan dampak terburuk akan memperdalam jurang kemiskinan.

Pengangguran menjadi permasalahan serius di suatu wilayah. Dari sisi ekonomi pengangguran akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosial pengangguran akan meningkatkan angka kemiskinan dan pada akhirnya berujung pada meningkatnya tingkat kejahatan.

Data ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung Agustus 2020 sebesar 4,67 persen, meningkat 0,64 poin dibandingkan Agustus 2019. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat bahkan meningkatkan persentase penduduk miskin di Lampung.

BPS Provinsi Lampung juga mencatat persentase penduduk miskin Lampung September 2020 sebesar 12,76 persen, meningkat 0,46 poin dibandingkan September 2019. Peningkatan persentase penduduk miskin di perkotaan jauh lebih ekstrem dibandingkan di perdesaan pada periode yang sama. Pada September 2020, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,59 persen, meningkat 1,53 poin dibandingkan September 2019. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 hanya meningkat 0,26 poin dibandingkan September 2019 menjadi 14,22 persen.

Komposisi pengangguran pada Agustus 2020 didominasi oleh TPT lulusan SMK (9,21 persen), lulusan SMA (6,97 persen), lulusan Universitas (5,51 persen) dan lulusan diploma (5,29 persen). Persentase komposisi pengangguran tersebut sudah terjadi selama tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kaum muda mendominasi pengangguran Lampung. Padahal, hasil Sensus Penduduk 2020 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Lampung mencatat bahwa pada September 2020, mayoritas penduduk Lampung didominasi generasi Z dan generasi milenial. Proporsi generasi Z (penduduk usia 8-23 tahun) sebanyak 27,80 persen dan proporsi generasi milenial (penduduk usia 24-39 tahun) sebanyak 25,54 persen.

Patut diwaspadai karena lulusan SMA/SMK ke atas dengan skill yang lebih baik malah terjebak dalam pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik yang dimaksud disini yaitu pengangguran yang terdiri dari para lulusan SMA sederajat dan lulusan universitas/diploma. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa tidak sepenuhnya pendidikan tinggi dengan skill yang dimiliki sejalan dengan pemanfaatan kesempatan kerja pada pasar kerja. Ada kecenderungan tingkat pendidikan tinggi akan memperbesar peluang seseorang menjadi pengangguran. Mendominasinya pengangguran terdidik di tahun 2020 menjadi sebuah ironi bagi Lampung, mengingat Lampung sedang mengalami awal masa bonus demografi.

Bonus demografi adalah kondisi demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk tidak dalam usia produktif (usia <15 tahun dan usia 65+ tahun). Berdasarkan hasil SP2020, proporsi penduduk usia produktif di Lampung sebesar 70,30 persen. Dengan proporsi penduduk tersebut dan didukung komposisi penduduk yang didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial, seharusnya menjadi momen bagi Lampung untuk bisa meningkatkan pembangunan.

Namun, kenyataan yang terjadi tak seindah teori dan harapan. Momen awal bonus demografi justru dihiasi dengan tingginya pengangguran terdidik di Lampung. Banyaknya tenaga kerja lulusan SMA/SMK ke atas tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Artinya pasar kerja di Lampung tidak mampu menyerap tenaga kerja tersebut. Pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi pengangguran di Lampung. Analisis Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan perusahaan. Secara umum, 8 dari setiap 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Untuk dapat bertahan di tengah situasi pandemi, sebanyak 33,23 persen perusahaan memilih untuk mengurangi pegawai yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi semakin memperkecil kesempatan pasar kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada.

Membeludaknya pengangguran terdidik di awal momen bonus demografi menjadi sebuah permasalahan serius bagi Lampung. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Pendidikan formal yang berkualitas khususnya di jenjang SMA/SMK ke atas adalah kuncinya. Saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada dunia pendidikan, terutama di masa pandemi saat ini.

Kurikulum yang mengutamakan keterampilan sangat dibutuhkan pada pendidikan formal jenjang SMA/SMK ke atas. Hal ini dilakukan agar para lulusan SMA/SMK ke atas lebih siap dalam berkompetensi di dunia kerja. Penting bagi Pemerintah Lampung untuk meningkatkan keterampilan generasi Z mulai dari sekarang. Karena, sekitar 7 tahun lagi seluruh generasi Z akan berada pada kelompok usia produktif dan menjadi aktor dalam pembangunan Lampung. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperluas kesempatan beasiswa bagi peserta didik bahkan menggratiskan biaya pendidikan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mengakibatkan pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Oleh karena itu, peningkatan jaringan telekomunikasi mutlak dilakukan. Jaringan telekomunikasi yang baik akan memperlancar proses pembelajaran daring hingga seluruh pelosok Lampung.

Kesejahteraan tenaga pendidik juga tak luput dari perhatian Pemerintah Lampung. Tidak hanya tenaga pendidik yang sudah menjadi tenaga kerja tetap, tenaga pendidik honorer pun perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Jaminan kesejahteraan berupa pendapatan yang cukup akan menjadi semangat tersendiri bagi tenaga pendidik untuk dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan formal, peningkatan jaringan telekomunikasi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik tetap dan honorer di Lampung diharapkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas yang mampu membuat pembangunan Lampung semakin baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian Lampung. Sehingga, slogan "Lampung Berjaya" akan bisa terwujud di masa yang akan datang.

Tanggal Terbit : 8 Maret 2021
Media : Harian Momentum
Tautan : -

Menilik Bonus Demografi Menuju Lampung Berjaya

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung telah melakukan rilis Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Pasca rilis SP2020, Lampung resmi memasuki Bonus Demografi. Mengapa? Berdasarkan rilis SP2020, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Lampung lebih banyak dari pada penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun dan usia >64 tahun). Proporsi penduduk usia produktif di Lampung berdasarkan SP2020 mencapai 70,31 persen. Bonus demografi ditandai dengan adanya perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif.

SP2020 mencatat penduduk Lampung berjumlah 9,01 juta jiwa, atau bertambah sekitar 1,40 juta jiwa dibandingkan SP2010. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,65 persen per tahun, maka rata-rata penduduk Lampung bertambah 140 ribu jiwa per tahun. Banyak stakeholder menantikan hasil SP2020. Bagi pemerintah daerah, SP2020 digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pembangunan Lampung.

Struktur penduduk menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. SP2020 juga mencatat penduduk Lampung didominasi oleh generasi Z (27,80 persen), generasi milenial (26,54 persen), dan generasi X (21,59 persen). Penduduk generasi Z adalah penduduk yang lahir antara tahun 1997-2012 (perkiraan usia sekarang 8-23 tahun). Penduduk generasi milenial adalah penduduk yang lahir antara tahun 1981-1996 (perkiraan usia sekarang 24-39 tahun). Sedangkan penduduk generasi X adalah penduduk yang lahir antara tahun 1965-1980 (perkiraan usia sekarang 40-55 tahun).

Dari sisi demografi, seluruh penduduk generasi X dan generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada usia produktif di tahun 2020. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh generasi Z akan berada pada usia produktif. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas inilah yang akan menjadi aktor penting dalam menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Lampung.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bonus demografi. Rasio ketergantungan sendiri berarti perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (bukan angkatan kerja) terhadap penduduk usia produktif (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tinggi beban yang

harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan hasil SP2020, rasio ketergantungan di Lampung sebesar 45,87 persen. Angka ini menurun 6,63 persen dibandingkan rasio ketergantungan tahun 2010 yang sebesar 52,50 persen.

Penurunan rasio ketergantungan akan mengurangi beban pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif, dengan demikian sumber daya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Sehingga terbuka jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk meraih keuntungan ekonomi yang disebut bonus demografi.

Mendominasinya proporsi penduduk usia produktif (yang termasuk dalam angkatan kerja) di Lampung berdasarkan hasil SP2020, menandakan terbukanya jendela kesempatan bagi Lampung untuk meraih bonus demografi. Namun, hal ini akan dapat dimaksimalkan jika diiringi dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tersebut. Dalam kegiatan produksi, tenaga kerja berperan penting untuk menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja harus terserap pada pasar kerja agar dapat meningkatkan perekonomian Lampung.

Kondisi ketenagakerjaan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung berada pada angka 4,67 persen atau naik 0,64 poin dibandingkan Agustus 2019 (4,03 persen). Meningkatnya TPT Lampung mengindikasikan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Lampung. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab meningkatnya TPT Lampung. Pandemi juga telah mengakibatkan merosotnya perekonomian Lampung. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen di tahun 2020. Lampung bahkan mengalami resesi selama tiga triwulan, mulai dari triwulan dua hingga triwulan empat di sepanjang tahun 2020.

Guncangan ekonomi Lampung akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Lampung Juli 2020 mencatat secara umum delapan dari setiap sepuluh perusahaan di Lampung mengalami penurunan pendapatan. Untuk menyikapi situasi pandemi yang berdampak pada aktivitas perusahaan, sebanyak 33,23 persen perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja.

Berkah bonus demografi untuk membangkitkan ekonomi Lampung, akan dapat dicapai jika pemerintah Provinsi Lampung mampu mengoptimalkan penduduk usia produktif. Di tengah kondisi pandemi yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya ini, alangkah baiknya pemerintah Provinsi Lampung mulai memberdayakan tenaga kerja yang didominasi oleh usia produktif. Saatnya pemerintah memberikan perhatian pada UMK yang umumnya didominasi oleh tenaga kerja usia produktif. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Lampung Juli 2020 juga mencatat bahwa tujuh dari setiap sepuluh pelaku usaha UMK lebih membutuhkan bantuan modal usaha di masa pandemi.

Oleh karena itu, seyogyanya alokasi dana desa tidak hanya tercurah pada pembagunan infrastruktur saja, namun juga mulai dialokasikan untuk bantuan modal bagi pelaku usaha UMK. Gerakan untuk mencintai produk dalam negeri pun perlu digaungkan oleh pemerintah Provinsi Lampung agar produk UMK dapat terserap di pasaran dan pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian roda ekonomi Lampung dapat terus berjalan dan dapat membuat Lampung keluar dari resesi.

Bonus demografi bisa menjadi keuntungan atau ancaman bagi ekonomi Lampung. Bonus demografi akan menjadi keuntungan jika tenaga kerja yang melimpah mampu terserap dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung. Bonus demografi akan menjadi ancaman jika terjadi gelombang pengangguran massal akibat melimpahnya tenaga kerja yang tidak dapat ditangani dengan baik.

Kesempatan bonus demografi mungkin tidak akan terulang kembali, ataupun jika terulang dibutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Semoga Lampung dapat mengoptimalkan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah saat ini, sehingga Lampung Berjaya dapat diwujudkan melalui bonus demografi.

Tanggal Terbit : 8 April 2021
Media : Harian Momentum
Tautan : -

Stabilitas Harga dan Rantai Distribusi Telur Ayam Ras

Berbelanja ke pasar tradisional di Sabtu pagi merupakan aktivitas rutin mingguan yang biasa saya lakukan. Maklum, ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai pekerja seperti saya, tidak ada hari lain yang bisa dipakai untuk berbelanja kebutuhan dapur selain di akhir pekan. Menyetok kebutuhan dapur menjadi pilihan yang harus saya ambil untuk menjamin ketersediaan bahan makanan di rumah selama satu minggu ke depan. Berbagai kebutuhan dapur mulai dari ikan segar, ayam segar, minyak goreng, sayur, buah, berbagai bumbu dapur dan tak lupa telur ayam ras saya usahakan agar bisa dipenuhi sebagai bahan makanan keluarga selama satu minggu.

Komoditi telur ayam ras kerap menjadi perhatian saya dan menjadi salah satu lauk favorit untuk disajikan di meja makan. Praktis, simpel untuk diolah dan sudah pasti disukai oleh seluruh anggota keluarga menjadikan telur ayam ras sebagai komoditi yang tidak pernah tertinggal untuk dibeli tiap akhir pekan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 Provinsi Lampung mencatat persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kelompok telur dan susu menempati urutan ke enam dari dua puluh kelompok pengeluaran di tahun 2020 (3,01 persen). Rata-rata konsumsi telur ayam ras masyarakat Lampung tahun 2020 sebanyak 9,41 butir/kapita/bulan.

Sepanjang Maret 2021, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga telur ayam ras di Lampung selalu turun dan mencapai titik terendah per tanggal 30 Maret 2021 dengan harga Rp. 21.000,- per kg. Turunnya harga telur ayam ras periode Maret 2021 juga sejalan dengan data inflasi yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Merujuk data BPS Lampung, terjadi deflasi 0,20 persen di Lampung pada Maret 2021 dan komoditi telur ayam ras memberikan andil -0,026 persen terhadap deflasi tersebut.

Sayangnya, harga telur ayam ras di Lampung per tanggal 1 April 2021 mulai mengalami kenaikan menjadi Rp. 21.700,- per kg. Kenaikan ini terus terjadi hingga pertengahan April 2021 dan mencapai titik tertinggi di tanggal 16 April 2021 dengan harga Rp. 24.700,- per kg. Mengutip data PIHPS, harga telur ayam ras mulai pertengahan hingga akhir April 2021 kembali turun menjadi Rp. 23.250,- per kg per tanggal 30 April 2021. BPS Lampung kembali mencatat terjadi deflasi 0,17 persen pada April 2021. Telur ayam ras memberikan andil 0,013 persen terhadap deflasi April 2021. Artinya, walaupun Lampung terjadi deflasi, telur ayam ras justru memberikan andil positif pada

deflasi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya terjadi kenaikan harga telur ayam ras selama April 2021, namun karena sumbangan kenaikan harganya tidak sebesar komoditi lain yang mengalami penurunan harga, maka kenaikan harga telur ayam ras tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan harga secara umum di Lampung.

Perubahan harga telur ayam ras yang sangat cepat pada Maret–April 2021 ini merupakan hal yang wajar. Karena telur ayam ras termasuk dalam salah satu kelompok yang lazim disebut *volatile goods*. Penghitungan inflasi yang dilakukan oleh BPS RI, dapat di-disagregasi menjadi inflasi inti, inflasi administered price, dan inflasi *volatile goods*. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten). Inflasi administered prices adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Inflasi *volatile foods* adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Inflasi *volatile goods* didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai *volatile foods*. Saat terjadi gejolak harga, kelompok *volatile foods* ini sering menjadi penyumbang utama inflasi baik di level nasional maupun di level propinsi. Komoditi lain yang juga termasuk dalam *volatile foods* adalah aneka cabai, aneka bawang, sayur, daging ayam ras, beras dan aneka produk pangan lainnya.

Perubahan harga yang terjadi pada *volatile foods* dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Namun, gejolak harga pangan pada *volatile food* juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai distribusi perdagangan barang dari produsen hingga konsumen akhir. Seberapa efisien rantai distribusi telur ayam ras di Lampung?

BPS Lampung setiap tahun melakukan Survei Pola Distribusi (POLDIS) untuk melihat rantai distribusi perdagangan komoditas pangan seperti telur ayam ras. Survei POLDIS terkini yang melihat rantai distribusi perdagangan telur ayam ras dilakukan tahun 2019 dengan menganalisis kegiatan yang terjadi selama tahun 2018. Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan telur ayam ras di Lampung menurut Survei POLDIS yaitu, produsen-agen-pedagang eceran-konsumen. Pasokan telur ayam ras di Lampung tidak hanya diperoleh dari dalam provinsi, namun juga dari provinsi lain yaitu Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Pembelian telur ayam ras dari Sulawesi Selatan sebanyak 9,09 persen dan pembelian dari DKI Jakarta sebanyak 1,12 persen.

Lampung juga memasok telur ayam ras ke provinsi lain, seperti Jawa Tengah. Penjualan telur ayam ras ke Jawa Tengah sebanyak 0,05 persen. Karena telur ayam ras di Lampung juga dibeli dari provinsi lain, maka alternatif rantai distribusi terpanjang menjadi luar provinsi-distributor-agen-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen. Rata-rata kenaikan harga telur ayam ras dari produsen ke konsumen di Lampung pada tahun 2018 sebesar 23,45 persen.

Rantai distribusi perdagangan telur ayam ras di Lampung tidak terlalu panjang. Artinya pendistribusian telur ayam ras dari produsen ke ke konsumen sudah cukup efektif. Rata-rata kenaikan harga dari produsen ke konsumen pun masih tergolong kecil. Ketentuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan penjualan di konsumen untuk telur ayam ras adalah Rp 19.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- per kg untuk harga pembelian di petani, dan Rp. 24.000,- per kg untuk harga penjualan di konsumen. Merujuk data PIHPS tersebut dapat dikatakan bahwa harga penjualan telur ayam ras masih tergolong wajar.

Kenaikan harga telur ayam ras hingga pertengahan April lalu disebabkan oleh tingginya permintaan komoditi ini baik di dalam Lampung ataupun di luar Lampung seperti Jawa Tengah. Kenaikan permintaan kemungkinan terjadi pada industri makanan ringan yang memproduksi makanan khas pengantar berbuka puasa selama Ramadhan.

Namun, kekhawatiran akan naiknya harga telur ayam ras tetap menjadi perhatian bagi saya. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi momen hari raya Idul Fitri. Biasanya terjadi gejolak harga pada beberapa komoditi yang termasuk volatile goods pada momen menjelang hari raya. Sebagai ibu rumah tangga, saya tetap berharap agar pemerintah dapat mengendalikan harga konsumen telur ayam ras dan harga pangan lain untuk tetap stabil menjelang hari raya Idul Fitri yang akan datang.

Tanggal Terbit : 4 Mei 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/stabilitas-harga-dan-rantai-distribusi-telur-ayam-ras.html>

Kecemasan Naiknya Harga Pangan Jelang Hari Raya

Aktivitas rutin mingguan yang saya lakukan di Sabtu pagi adalah berbelanja ke pasar tradisional. Bagi ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai pekerja seperti saya, berbelanja kebutuhan dapur setiap akhir pekan merupakan pilihan yang harus saya ambil. Hal ini saya lakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan seperti ikan segar, daging ayam segar, minyak goreng, sayur, buah, aneka bumbu dapur, aneka cabai, aneka bawang dan telur ayam ras sebagai bahan pangan keluarga selama satu minggu.

Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, perubahan harga bahan pangan menjadi perhatian saya setiap kali berbelanja. Separuh bulan Ramadhan sudah dilalui selama April 2021. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat terjadi inflasi sebesar 0,13 persen pada April 2021. Beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan atau penurunan harga terbesar antara lain daging ayam ras, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, dan beras. Disamping itu, ada juga komoditas non bahan pangan yang juga mengalami kenaikan atau penurunan harga terbesar yaitu rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga dan emas perhiasan. Lantas, bagaimana harga bahan pangan menjelang hari raya nanti?

Merujuk data BPS 2018-2020, Indonesia selalu mengalami inflasi pada bulan yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Pada Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,59 persen (Idul Fitri pada 15 Juni 2018). Kemudian di Juni 2019 juga terjadi inflasi sebesar 0,55 persen (Idul Fitri pada 5 Juni 2019). Demikian juga halnya di Mei 2020, terjadi inflasi sebesar 0,07 persen (Idul Fitri pada 24 Mei 2020). Selama tiga tahun terakhir, komoditi yang mengalami kenaikan atau penurunan harga terbesar dan menjadi penyumbang inflasi pada bulan-bulan tadi masih didominasi oleh komoditi bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bahan pangan lainnya. Pada periode yang sama ada juga komoditi non bahan pangan yang mengalami kenaikan atau penurunan harga terbesar dan menjadi penyumbang inflasi, seperti tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, bahan bakar rumah tangga dan emas perhiasan.

Tradisi umum saat hari raya adalah adanya perbedaan kualitas konsumsi. Momen hari raya membuat keluarga saya dan sebagian besar masyarakat muslim untuk mengistimewakan konsumsi. Berbagai hidangan istimewa seperti ketupat, opor, semur, rendang daging dan lain sebagainya akan tersaji di meja makan saat hari raya. Ditambah lagi berbagai hidangan kue-kue khas

lebaran lainnya yang akan menambah variasi konsumsi di keluarga. Tak hanya untuk konsumsi bagi anggota keluarga saja, tradisi mengirimkan hantaran kepada sanak saudara dan teman sejawat juga dilakukan menjelang hari raya. Hal ini lah yang membuat meningkatnya demand bahan pangan menjelang hari raya.

Komoditi bahan pangan sering kali mengalami fluktuasi harga yang cukup ekstrim menjelang hari raya, dan menjadi penyumbang inflasi terbesar. Umumnya, fluktuasi harga dipengaruhi supply dan demand. Tak hanya itu, panjang pendeknya rantai distribusi bahan pangan juga turut mempengaruhi fluktuasi harga.

Setiap tahun BPS melakukan Survei Pola Distribusi (POLDIS) untuk melihat rantai distribusi perdagangan komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Dalam suatu rantai distribusi perdagangan diperoleh Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) pada setiap transaksi yang dilakukan. MPP diartikan sebagai besarnya (persen) kenaikan harga bahan pangan tertentu dari produsen ke konsumen. Semakin banyak pelaku perdagangan yang terlibat, semakin tidak efisien rantai distribusi perdagangan. Kenaikan harga yang diterima konsumen akan semakin meningkat jika semakin panjang rantai distribusi perdagangan.

Fluktuasi harga cabai merah berkaitan dengan momen tertentu seperti hari raya. Namun, faktor cuaca dan musim panen di daerah sentra juga mempengaruhi perubahan harga cabai merah. Selain karena faktor permintaan dan penawaran, pendistribusian cabai merah dari produsen (petani) ke konsumen yang belum efisien juga menjadi penyebab perubahan harga cabai merah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 mencatat bahwa cabai merah merupakan salah satu komoditi yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Rata-rata konsumsi cabai merah penduduk Indonesia sebesar 0,14 kg/kapita/bulan. Kegemaran masyarakat Indonesia terhadap masakan dengan cita rasa pedas membuat cabai merah menjadi salah satu bumbu masak yang paling digemari di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei POLDIS 2020, rantai utama perdagangan cabai merah di Indonesia tahun 2019 adalah produsen-pengepul-pedagang eceran-konsumen. Peran pengepul sangat besar dalam menentukan harga cabai merah ke konsumen. Pengepul yang menjadi penghubung antara produsen (petani) dan pedagang eceran. Terkadang pengepul juga turut berperan dalam menaikkan harga cabai merah ke konsumen. Kenaikan harga cabai merah dari tingkat petani ke konsumen akhir (MPP Cabai merah) adalah sebesar 61,31 persen.

Sama halnya dengan cabai merah, komoditi bawang merah juga merupakan salah satu komoditi yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia berdasarkan Susenas Maret 2020. Rata-rata konsumsi bawang merah penduduk Indonesia sebesar 2,22 ons/kapita/bulan. Bawang merah selalu dipakai sebagai bumbu masakan wajib bagi masyarakat Indonesia. Pola tanam yang bersifat musiman dan peningkatan permintaan menjelang hari raya dan akhir tahun mengakibatkan peningkatan harga bawang merah di tingkat konsumen. Pendistribusian bawang merah yang masih bermasalah pun ditenggarai menjadi penyebab berfluktuasinya harga bawang merah.

Rantai perdagangan bawang merah di Indonesia mengacu pada Survei POLDIS 2020 menunjukkan fakta yang sama seperti komoditi cabai merah yaitu produsen-pengepul-pedagang eceran-konsumen. Selain dari pengepul, pendistribusian bawang merah ke pedagang eceran juga berasal dari produsen, distributor, sub distributor, agen, dan pedagang grosir. Pada kondisi terjadi lonjakan permintaan mendekati hari raya keagamaan di Indonesia dan pada saat di luar masa panen belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, disinilah nampak peran importir memberikan pasokan bawang merah ke pedagang grosir. Survei POLDIS 2020 juga mencatat MPP bawang merah sebesar 38,01 persen.

Bahan pangan lain dengan harga relatif terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia adalah daging ayam ras. Fluktuasi harga daging ayam ras sering kali terjadi pada momen hari besar nasional. Sama seperti bawang merah, pendistribusian barang yang masih belum efisien dicurigai menjadi penyebab fluktuasi harga pada daging ayam ras. Rata-rata konsumsi daging ayam ras/kampung masyarakat Indonesia berdasarkan Susenas Maret 2020 sebesar 0,56 kg/kapita/bulan.

Merujuk Survei POLDIS 2020, rantai utama distribusi perdagangan daging ayam ras di Indonesia tahun 2019 adalah produsen-pedagang eceran-konsumen. Namun, cukup banyak juga daging ayam ras yang didistribusikan dari produsen ke konsumen yang melakukan kegiatan usaha restoran, rumah makan, dan katering melalui pedagang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa cukup besar juga konsumsi daging ayam yang didominasi oleh kegiatan penyediaan makan dan minum. Kenaikan harga daging ayam ras dari produsen sampai konsumen (MPP daging ayam ras) di Indonesia sebesar 25,53 persen.

Komoditi lain yang juga banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah telur ayam ras. Telur ayam ras memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama dari segi protein dan mudah dicerna oleh tubuh. Susenas Maret 2020 mencatat rata-rata konsumsi telur ayam ras masyarakat Indonesia sebesar 9,37 butir/kapita/bulan. Fluktuasi harga telur ayam ras terkait dengan permintaan dan pasokan serta mahalnyabiaya transportasi. Peningkatan harga telur ayam ras terjadi terutama pada hari besar keagamaan dan pada akhir tahun.

Rantai pendistribusian perdagangan telur ayam ras secara umum berdasarkan Survei POLDIS 2020, yaitu produsen-pedagang eceran-konsumen akhir. Beberapa peternak di daerah sentra seperti Bogor dan Blitar mendirikan koperasi guna memutus rantai distribusi dan menurunkan disparitas harga (Ketut Diarmita dalam BPS, 2020). MPP telur ayam ras adalah 13,07 persen.

Untuk menjamin stabilitas dan kepastian harga pangan, pemerintah telah membuat peraturan terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di konsumen untuk beberapa komoditi pangan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020. Beberapa harga penjualan komoditi pangan yang tercatat pada permendag tersebut antara lain, harga penjualan bawang merah Rp. 32.000,-/kg, daging ayam ras Rp. 35.000,-/kg dan telur ayam ras Rp. 24.000,-/kg.

Sebagai ibu rumah tangga, saya tetap mengkhawatirkan adanya kenaikan harga bahan pangan menjelang hari raya. Harapan saya yang mungkin juga menjadi harapan ibu rumah tangga lain pada umumnya adalah pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi bahan pangan menjelang hari raya nanti. Saya pun berharap agar pemerintah dapat mengantisipasi tingginya demand bahan pangan dengan menjamin kecukupan supply bahan pangan tersebut. Agar tidak terjadi fluktuasi ekstrim harga pangan menjelang hari raya.

Tanggal Terbit : 5 Mei 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/febiyana-qomariyah/kecemasan-naiknya-harga-pangan-jelang-hari-raya-1vgVTZYmeXZ/full>

Vaksinasi dan Gairah Ekonomi Lampung

Resesi ekonomi masih menghantui Lampung, ini tergambar dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 yang telah dirilis oleh BPS Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali mengalami kontraksi 2,10 persen (*y-o-y*) di triwulan I 2021. Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini sedikit mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2020, ekonomi Lampung mengalami kontraksi 2,26 persen (*y-o-y*). Kontraksi ekonomi pada triwulan I 2021 ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Lampung. Kontraksi ekonomi mulai terjadi di Lampung di triwulan II 2020 (3,57 persen *y-o-y*), seiring dengan pandemi Covid-19 juga mulai melanda Lampung pada saat itu.

BPS Lampung mencatat bahwa sektor transportasi dan pergudangan menjadi sumber utama kontraksi ekonomi Lampung pada triwulan I 2021. Ini mengindikasikan bahwa masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk melakukan mobilitas seperti sebelum pandemi melanda Lampung. Dari sisi pengeluaran, catatan BPS Lampung menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama kontraksi ekonomi Lampung di triwulan I 2021. Ini juga mengindikasikan masih ada keraguan bagi sebagian masyarakat Lampung untuk membelanjakan uangnya di tengah kondisi ketidakpastian akan berakhirnya pandemi.

Pandemi telah menurunkan gairah ekonomi Lampung hingga mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi selama empat triwulan berturut-turut. Keadaan ini turut menjadi penyebab terjadinya resesi ekonomi Lampung hingga saat ini. Catatan trend pertumbuhan ekonomi Lampung (*y-o-y*) selalu mengalami kontraksi mulai triwulan II 2020 hingga triwulan I 2021. Walaupun terjadi kontraksi ekonomi, trend pertumbuhan ekonomi Lampung (*y-o-y*) juga menunjukkan perbaikan di setiap triwulan. Hal ini mengindikasikan adanya secercah harapan bagi Lampung untuk keluar dari jurang resesi.

Vaksinasi yang sedang berjalan saat ini diharapkan dapat mencapai *herd immunity*. Tujuannya agar masyarakat Lampung tidak lagi cemas akan adanya pandemi. Kepercayaan masyarakat Lampung kembali pulih, sehingga mereka dapat melakukan mobilitas dan aktivitas ekonomi, agar percepatan pemulihan ekonomi Lampung dapat segera terwujud.

Geliat perbaikan ekonomi mulai nampak di berbagai sektor dominan dalam perekonomian Lampung. Sektor industri pengolahan yang menjadi sektor dominan kedua di Lampung tumbuh tipis sebesar 0,02 persen (*y-o-y*) pada triwulan I 2021. Sementara sektor dominan ketiga yakni sektor perdagangan yang walaupun masih mengalami kontraksi 5,93 persen (*y-o-y*) pada triwulan I 2021, namun kontraksi tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 (9,87 persen *y-o-y*). Sementara sektor pertanian sebagai sektor andalan ekonomi Lampung, pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi 1,73 persen (*y-o-y*). Ini disebabkan antara lain karena menurunnya produksi jagung, pisang dan kayu log sebagai kecenderungan petani untuk mengurangi produksinya seiring belum membaiknya konsumsi masyarakat ditengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

BPS Lampung telah merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 4,54 persen, turun 0,12 persen poin dibanding Agustus 2020. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi Agustus 2020 dan Februari 2021 adalah kondisi pandemi Covid-19 sudah melanda Lampung. Ini menandakan bahwa selama pandemi telah terjadi geliat perbaikan ekonomi Lampung yang tercermin dari penurunan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja pada Februari 2021 dibandingkan Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 Februari 2021 sebanyak 340,3 ribu orang, menurun sebanyak 315,6 ribu orang (48,12 persen) dibandingkan Agustus 2020. Artinya, geliat perbaikan ekonomi Lampung juga telah terjadi selama masa pandemi yang tercermin dari menurunnya penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Februari 2021 dibanding Agustus 2020.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan peran penting pada perekonomian Lampung, karena 63,76 persen ekonomi Lampung ditopang dari konsumsi masyarakat. Namun, masyarakat masih menahan untuk membelanjakan uangnya di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi 3,89 persen di triwulan I 2021. Meskipun demikian, sudah nampak sedikit kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi di triwulan I 2021. Hal ini terlihat dari nilai kontraksi pada komponen konsumsi rumah tangga di triwulan I 2021 yang lebih baik dibandingkan dengan kontraksi di triwulan IV 2020 (3,97 persen *y-o-y*).

Pemberian THR kepada ASN dan pegawai swasta sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga baru akan terlihat pada triwulan II nanti. Stimulus lain yang dapat diberikan pemerintah Lampung adalah dengan melakukan percepatan pemanfaatan dana desa dengan merealisasikan bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan bagi UMKM

untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sehingga ekonomi Lampung dapat bergairah kembali. Di sisi lain, konsumsi pemerintah juga memegang peranan penting dalam perekonomian Lampung. Akan tetapi di triwulan I 2021 pemerintah belum melakukan pembelanjaan. Sehingga, realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pemerintah Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD masih belum mengalami pertumbuhan.

Momentum Idul Fitri dan program vaksinasi mendorong masyarakat untuk bergerak dan beraktivitas. Rasa jenuh setelah lebih dari setahun hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 pada akhirnya menjadi pemicu ramainya pasar dan pusat perbelanjaan di Lampung. Wacana dibukanya kembali sekolah pada tahun ajaran baru nanti juga mulai bergulir di masyarakat.

Secara ekonomi tentunya hal ini sangat baik, karena akan memicu pertumbuhan ekonomi Lampung untuk tumbuh positif dan membawa Lampung keluar dari jurang resesi. Namun, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Masyarakat tidak boleh abai dan lalai. Gerakan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) harus tetap dilakukan di setiap aktivitas masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus tetap waspada bahwa pandemi ini belum berakhir. Bahkan, harus ada juga peningkatan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah terhadap masuknya varian baru virus Covid-19 dari India ke Lampung.

Peran penting masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan gairah ekonomi Lampung. Kedisiplinan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan mutlak harus dilakukan. Vaksinasi bukan berarti kebal Covid-19, namun vaksinasi hanya sebagai upaya pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat harus sadar bahwa dengan mengurangi mobilitas akan turut membantu menekan penyebaran Covid-19. Tidak ada yang menjamin bahwa dengan membawa hasil rapid anti gen negatif selama dalam melakukan perjalanan, tidak akan terpapar Covid-19. Semoga pandemi segera berakhir dan perekonomian Lampung akan lebih baik lagi.

Tanggal Terbit : 18 Mei 2021

Media : viva.co.id

Tautan : <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1373194-vaksinasi-dan-gairah-ekonomi-lampung>

Mendorong Pembangunan Desa Melalui Data Podes

Salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang desa dan mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Oleh karena itu sudah seyogyanya desa sebagai wilayah terkecil pemerintahan mendapatkan perhatian khusus agar pembangunan nasional dapat terwujud. Pembangunan nasional dimulai dari pembangunan di desa.

Dulu, orang beranggapan desa bukanlah tempat yang tepat untuk mencari pekerjaan dan penghasilan. Sehingga orang berbondong-bondong melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak di kota. Namun kini, setelah lebih dari setahun pandemi Covid-19 mendera Indonesia, yang terjadi malah sebaliknya. Orang kembali ke desa untuk tetap bertahan di tengah badai pandemi.

Pandemi telah melemahkan perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi lebih berat dirasakan oleh masyarakat perkotaan dibandingkan perdesaan. Terutama bagi pekerja informal di kota yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Masyarakat kota melakukan ruralisasi akibat adanya pandemi. Kembalinya orang kota ke desa sebagai dampak dari pandemi, mengakibatkan bertambahnya beban pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan merupakan cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan yang dimaksud yaitu desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi desa yang demikian dapat mempersempit kesenjangan antara desa dan kota. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan (BPS, 2021).

Perkembangan pembangunan desa dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang dan mandiri. Terdapat lima dimensi yang digunakan

untuk menyusun IPD, yaitu Dimensi Pelayanan Dasar, Dimensi Kondisi Infrastruktur, Dimensi Aksesibilitas Transportasi, Dimensi Pelayanan Umum, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pengumpulan data untuk mengukur IPD dilakukan melalui kegiatan pendataan Potensi Desa (PODES). Pendataan PODES 2021 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tanggal 2-30 Juni 2021.

PODES 2021 mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia. Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia turut mengambil peran dalam pendataan PODES 2021 ini. Pendataan PODES 2021 di Lampung bukan hanya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, namun juga sebagai gambaran pembangunan keberhasilan pembangunan Lampung.

Data terkini yang menggambarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) diperoleh dari PODES 2018. Data PODES sebelumnya yang digunakan sebagai pembandingan untuk melihat perkembangan IPD yakni PODES 2014. Merujuk data PODES 2018, telah terjadi perbaikan status desa dari angka IPD Lampung. Dari total 2.446 desa (menurut data Kemendagri) di Lampung tahun 2018, sebanyak 2.219 desa di Lampung berstatus desa berkembang (90,72 persen). Desa mandiri di Lampung sebanyak 154 desa (6,30 persen). Desa tertinggal sebanyak 73 desa (2,98 persen).

Mengutip data PODES 2018 dari BPS, dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa mengalami penambahan nilai dari 61,94 berdasarkan PODES 2014 menjadi 71,88 pada PODES 2018 (bertambah 9,94 poin). Penambahan terbanyak pada pembentuk IPD Lampung 2018 dihasilkan dari dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Hal ini menandakan semakin baiknya pelaksanaan otonomi di desa. Semua permasalahan berkaitan dengan pemerintahan desa diputuskan sendiri oleh desa bersama masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintahan.

PODES 2018 juga menunjukkan bahwa dimensi Aksesibilitas Transportasi mengalami penambahan nilai dari 73,56 berdasarkan PODES 2014 menjadi 80,12 pada PODES 2018 (bertambah 6,56 poin). Penambahan IPD Lampung dari dimensi ini dapat diartikan telah adanya perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang dilalui dari desa ke Kantor Camat, Kantor Bupati dan bahkan kualitas jalan antar desa.

Waktu tempuh yang digunakan oleh masyarakat desa menuju Kantor Camat dan Kantor Bupati menjadi lebih cepat. Hal yang sama juga terjadi pada saat masyarakat melakukan mobilisasi antar desa. Perbaikan infrastruktur jalan ditandai dengan kemudahan dan kecepatan menuju desa lain.

Pendataan PODES tahun ini akan menggambarkan kondisi pembangunan desa pada masa pandemi Covid-19. Pembangunan Lampung di tengah pandemi Covid-19 tentunya akan terfokus pada pemulihan ekonomi Lampung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Namun, pembangunan desa juga tetap menjadi perhatian seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pembangunan pada lima dimensi yang digunakan untuk menyusun IPD Lampung menjadi perhatian pemerintah. Karena salah satu tujuan khusus yang ingin dicapai dari pendataan PODES 2021 yaitu menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa. Secara umum, tujuan PODES 2021 yaitu menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan meliputi data sosial, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah. Oleh karena itu, peran serta dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai stakeholder dan pembuat kebijakan sangat diperlukan guna keberhasilan kegiatan PODES 2021. Data PODES 2021 sangat berguna sebagai bahan evaluasi pembangunan desa dan pembangunan Lampung secara menyeluruh.

Tanggal Terbit : 5 Juni 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/febiyana-qomariyah/mendorong-pembangunan-desa-melalui-data-podes-1vsqXFkF9oc>

Bahagiakah Penduduk Indonesia Selama Pandemi?

Secara umum, orang biasa mengaitkan kesejahteraan dengan kebahagiaan. Kesejahteraan umumnya digambarkan dengan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang. Orang dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung berpeluang lebih besar untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun, pada sebagian orang, kebahagiaan tidak hanya dipandang dengan besar kecilnya pendapatan. Beberapa orang ada yang menyikapi kebahagiaan dengan adanya kebebasan untuk bisa melakukan apapun, dimanapun, kapanpun. Bagi sebagian orang yang lain kebahagiaan dimaknai sebagai momentum untuk bisa berkumpul dengan keluarga dan orang terkasih yang berperan penting dalam hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia didefinisikan sebagai sebagai keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan). Kebahagiaan sendiri diartikan sebagai kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin (kbbi.web.id). Setiap orang memiliki persepsi kebahagiaan yang berbeda. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan umumnya dianggap sebagai hal penting dalam hidup. Banyak orang beranggapan bahwa tujuan akhir hidup adalah kebahagiaan.

Pengukuran Kebahagiaan

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengukuran kebahagiaan melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Pengukuran ini dilakukan karena beragamnya persepsi seseorang dalam menilai kebahagiaan. Pengukuran ini menghasilkan sebuah indikator yang disebut sebagai Indeks Kebahagiaan. Pengukuran Indeks Kebahagiaan dilakukan oleh BPS sejak tahun 2014 dan 2017. Di tahun 2021 ini, BPS kembali akan melakukan pengukuran Indeks Kebahagiaan untuk yang ketiga kalinya.

Kebahagiaan mencakup fenomena kehidupan yang kompleks dan berbagai determinannya yang saling berkorelasi. Penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang tercakup dalam tiga dimensi kehidupan, yaitu (1) Dimensi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), (2) Dimensi Perasaan (Affect), dan (3) Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Dimensi Kepuasan Hidup dibedakan menjadi subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Kepuasan Hidup Sosial (BPS, 2017).

Pada tahun 2014, BPS melakukan pengukuran kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Di tahun 2017, Indeks Kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup. Penambahan dimensi pada pengukuran kebahagiaan di tahun 2017 dilakukan berdasarkan adaptasi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang dikombinasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat penambahan variabel terkait kriminalitas dan perilaku peduli lingkungan hidup. Sehingga, di tahun ini terdapat satu tujuan khusus SPTK 2021 yang ingin dicapai yaitu menyediakan data untuk menghitung indikator terkait kriminalitas.

Gambaran Kebahagiaan di Indonesia

Menurut BPS, Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017 sebesar 70,69. Artinya dalam skala 0-100, kondisi kehidupan penduduk Indonesia dapat dikatakan cukup bahagia, karena rata-rata kebahagiaan sudah di atas 50. Dari tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks kebahagiaan, Dimensi Kepuasan Hidup memiliki kontribusi tertinggi (34,80 persen), Dimensi Makna Hidup memiliki kontribusi tertinggi kedua (34,02 persen), sedangkan Dimensi Perasaan dengan kontribusi terkecil (31,18 persen).

Mengutip data BPS, Keharmonisan Keluarga merupakan salah satu indikator pada Sub Dimensi Kepuasan Hidup Sosial berpengaruh tinggi terhadap kebahagiaan penduduk Indonesia dengan angka 80,05. Ini dapat diartikan bahwa memiliki hubungan yang berkualitas dengan keluarga dan orang terdekat akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dalam menjalani hidup. Namun terkadang, seseorang tidak menyadari bahwa hal yang paling berpengaruh dalam kepuasan hidupnya adalah keluarga.

Pada Dimensi Makna Hidup, indikator Tujuan Hidup memiliki pengaruh yang terbesar pada kebahagiaan penduduk Indonesia (75,83) dan indikator Pengembangan Diri memiliki pengaruh terkecil (64,15). Ini mengindikasikan bahwa umumnya penduduk Indonesia merasa optimis dengan masa depannya, sementara upaya mengembangkan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masih relatif rendah. Pada dimensi Perasaan, indikator Perasaan Senang/Riang/Gembira menjadi nilai yang paling berpengaruh terhadap kebahagiaan penduduk Indonesia (75,06).

Kebahagiaan Penduduk Indonesia Saat Ini

Indonesia dan juga negara lain di seluruh dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya menurunkan kesehatan penduduk Indonesia, bahkan telah meluluhlantakan perekonomian Indonesia. Resesi ekonomi telah melanda Indonesia. Banyak penduduk kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi. Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi tidak stabil.

Penambahan kasus harian Covid-19 masih terus terjadi. Data dari satgas Penanganan Covid-19 hingga 10 Juni 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.885.942 orang, pasien sembuh sebanyak 1.728.914 orang, pasien meninggal 52.373 orang (covid19.go.id).

Selama pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan seperti sekolah, bekerja dan beribadah dari rumah. Bahkan, di beberapa daerah juga diberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19. Pandemi memaksa kita untuk melakukan semua aktivitas dari rumah, dan disinilah peran pentingnya keluarga.

Berkumpul dan beraktivitas bersama keluarga akan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun aktivitas di luar rumah dibatasi akibat pandemi, kita tetap merasa bahagia karena keberadaan keluarga yang selalu menemani segala aktivitas kita di rumah.

Banyak hal dapat dilakukan untuk menjaga perasaan tetap bahagia biarpun hanya di rumah saja. Misalnya, menonton drama korea, menanam dan merawat tanaman di rumah, memasak makanan kesukaan keluarga dan lain sebagainya. Lakukan aktivitas apapun yang membuat kita bahagia, dengan demikian maka imunitas akan terjaga.

Kebahagiaan penduduk Indonesia pada masa pandemi covid-19 akan tergambar pada Indeks Kebahagiaan yang dihasilkan dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Tahun 2021. Pengumpulan data lapangan SPTK 2021 akan dilaksanakan oleh BPS pada bulan Juli 2021 nanti. Secara umum, tujuan SPTK 2021 bertujuan mendapatkan informasi rinci tentang tingkat kebahagiaan yang diukur dengan variabel objektif dan subjektif yang relevan. SPTK 2021 akan dilakukan secara sampel. Keberhasilan kegiatan SPTK 2021 tak lepas dari dukungan semua pihak baik pemerintah dan penduduk Indonesia yang menjadi sampel kegiatan ini. Meskipun bersifat subyektif, kebahagiaan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan.

Tanggal Terbit : 11 Juni 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/febiyana-qomariyah/bahagiakah-penduduk-indonesia-selama-pandemi-1v6FAXXncS>

<https://lampung.bps.go.id>

PPN Sembako, Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi

Belakangan ini hangat dibicarakan mengenai wacana kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. Pemerintah berencana menggenjot penerimaan pajak negara di tengah tekanan pandemi Covid-19. Kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah antara lain, kenaikan Pajak Penghasilan (PPH) bagi orang kaya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penghapusan pajak (*tax amnesty*).

Dari tiga jenis kebijakan perpajakan tadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang paling menarik perhatian saya. Sebagai masyarakat biasa, pajak ini yang paling sering terdengar di kehidupan sehari-hari. Saat saya melakukan pembelian produk makanan minuman di minimarket/supermarket pasti tertera ada PPN di *struk* belanja. Demikian juga halnya ketika saya makan di restoran dan membeli pakaian di toko swalayan, semua ada PPN-nya. PPN akan dikenakan penjual kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.

Pengertian PPN seperti yang dijelaskan pada detik.com (8/6/2021) saat mengutip laman Kementerian Keuangan adalah, pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN ini masuk dalam jenis pajak tak langsung, artinya pajak ini disetorkan oleh pihak lain (pedagang). PPN yang selama ini berlaku di Indonesia sebesar 10 persen. Dalam draft RUU perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPN direncanakan naik menjadi 12 persen.

Pemerintah juga berencana memasang tarif PPN pada barang kebutuhan pokok, alias sembako. Tarif PPN sebesar 1 persen menjadi salah satu opsi pada draft RUU perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut. Barang kebutuhan pokok yang dikenakan PPN antara lain beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

Sebagai ibu rumah tangga, wacana ini tentu mengundang tanda tanya besar pada diri saya. Jika sembako ada PPNnya, berapa lagi harga yang harus saya bayar ketika saya membeli sembako? Ambil contoh sayuran seperti cabai yang sangat fluktuatif kenaikan harganya. Beberapa bulan yang lalu cabai sempat menembus harga di kisaran Rp. 100.000,-/kg. Berapa harga yang harus saya bayar jika cabai dikenakan PPN dan pada saat yang bersamaan harga cabai sedang tinggi?

Memang benar, jika tarif pajak naik, maka penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat. Namun, apakah menaikkan tarif pajak tepat dilakukan di tengah momentum pemulihan ekonomi? Kenaikan PPN otomatis akan menaikkan harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh masyarakat. Padahal di tengah kondisi penuh ketidakpastian ini, daya beli masyarakat tengah tertekan akibat pandemi. Menaikkan PPN di tengah lemahnya daya beli membuat konsumsi masyarakat tertekan dan menghambat pemulihan ekonomi.

Merujuk data BPS, konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Indonesia. Lebih dari separuh ekonomi Indonesia (sekitar 56 persen) ditopang dari komponen konsumsi rumah tangga. Artinya, jika terjadi sedikit perubahan pada komponen konsumsi rumah tangga, maka besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal, harapan akan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia mulai tampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang telah dirilis BPS pada Mei 2021 lalu.

Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi 0,74 persen (y-o-y). Meskipun mengalami kontraksi, namun angka ini sudah sedikit membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 dengan kontraksi 2,19 persen (y-o-y) dan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2020 yang juga kontraksi 3,49 persen (y-o-y).

Angka Kemiskinan

Jika kebijakan tarif PPN barang kebutuhan pokok diterapkan pada saat bersamaan dengan pengurangan program bantuan sosial, maka dapat dipastikan sulit bagi Indonesia untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi. Ancaman naiknya angka kemiskinan mengintai Indonesia ketika tarif PPN sembako mulai diberlakukan.

Tingkat kemiskinan Indonesia selama tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Menurut BPS, komposisi bahan makanan masih mendominasi garis kemiskinan di Indonesia sekitar 73 persen. Artinya jika terjadi kenaikan harga pangan, akan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Kenaikan PPN dan pemberlakuan PPN sembako pada masa pandemi, semakin menyengsarakan masyarakat miskin.

Tak hanya itu, aksi *panic buying* menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya. Wacana PPN sembako mendorong masyarakat membeli sembako di luar batas kebutuhan. Ini dilakukan karena masyarakat takut harganya naik akibat PPN sembako. Hal ini tentu berdampak pada terjadinya kelangkaan sembako dan inflasi yang tinggi disebabkan naiknya harga sembako. Kelompok bahan makanan, bahan minuman dan tembakau umumnya mendominasi angka Inflasi Indonesia.

Saya berharap pemerintah dapat selektif dan kreatif dalam menggenjot penerimaan negara. Harus dicari momentum yang pas untuk menaikkan tarif PPN. Rencana perpajakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan komunikasi publik yang baik. Pengenaan tarif PPN sembako sejatinya perlu dikaji ulang, agar tidak memberatkan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kami untuk taat membayar pajak.

Tanggal Terbit : 22 Juni 2021
Media : detik.com
Tautan : <https://news.detik.com/kolom/d-5615657/ppn-sembako-daya-beli-dan-pemulihan-ekonomi?ga=2.44212836.1703904134.1638171949-783557366.1617351272>

Ekonomi Tumbuh di Tengah PPKM, Mungkinkah?

Kontraksi ekonomi di kuartal II tahun lalu menjadi titik awal jatuhnya ekonomi Lampung pasca terjadinya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Lampung kuartal II 2020 berkontraksi 3,48 persen (y-o-y). Kontraksi ekonomi sebesar 2,41 persen (y-o-y) kembali terjadi di kuartal III 2020. Kondisi ini menempatkan Lampung pada zona resesi. Pemerintah Provinsi Lampung berusaha keras untuk keluar dari zona resesi.

Masa New Normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M -yang hingga saat ini telah berubah menjadi 5M bahkan 6M- mulai diberlakukan untuk membentengi aktivitas masyarakat Lampung demi perbaikan roda perekonomian. Kebijakan tersebut berpengaruh positif pada ekonomi Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka negatif pada pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2020.

Sinyal pemulihan ekonomi mulai nampak di awal tahun 2021. Pelaksanaan vaksinasi yang dimulai awal tahun ini diharapkan dapat mencapai herd immunity. Vaksinasi dapat memulihkan kepercayaan masyarakat untuk dapat melakukan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sehingga, pemulihan ekonomi Lampung dapat terwujud di tahun ini. Meskipun di kuartal I 2021 Lampung masih mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,10 persen (y-o-y), namun kontraksi ekonomi yang terjadi masih lebih rendah dibandingkan kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 2,26 persen (y-o-y).

Pertumbuhan ekonomi positif mulai menyambangi Lampung pada kuartal II 2021. Bulan Agustus 2021 lalu, BPS Lampung telah mengumumkan ekonomi Lampung tumbuh 5,03 persen (y-o-y) pada kuartal II 2021. Keadaan ini menandakan Lampung telah keluar dari zona resesi. Namun, berbalik arahnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat kontraksi ekonomi yang cukup dalam di kuartal II 2020. Angka tahun 2020 tentunya berkaitan dengan angka tahun 2021. Basis penghitungan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 secara tahunan (y-o-y) adalah situasi ekonomi tahun lalu, yaitu kuartal II 2020.

Selain itu, angka positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 juga dapat diartikan bahwa mulai muncul perbaikan kinerja ekonomi pada berbagai lapangan usaha di Lampung. Sektor perdagangan adalah sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi (1,52 persen). Di kuartal II 2021 sektor perdagangan tumbuh sebesar 13,30 persen (y-o-y). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi di kuartal ini. Momentum Ramadhan dan

Idul Fitri serta adanya perpanjangan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil sebesar 100 persen hingga 31 Mei 2021 memicu geliat positif pada sektor perdagangan. Lebih lanjut, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara masif pun turut mendatangkan dampak positif pada pertumbuhan sektor jasa kesehatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua. Pertumbuhan sebesar 10,03 persen (y-o-y) terjadi pada sektor jasa kesehatan di kuartal II 2021.

Sektor transportasi dan pergudangan yang pada kuartal I 2021 mengalami kontraksi terdalam (14,49 persen secara y-o-y) dan menjadi sumber kontraksi terdalam (0,79 persen), menunjukkan kebangkitan dan mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga di kuartal II 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,95 persen (y-o-y) terjadi di sektor transportasi dan pergudangan. Fenomena di lapangan menunjukkan ada peningkatan pergerakan masyarakat Lampung di tempat transit seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan, pada kuartal II 2021 dibandingkan kuartal II 2020 dan kuartal I 2021.

Tantangan pemulihan ekonomi belum berakhir. Di tengah bergairahnya ekonomi dalam melepas resesi, Lampung kembali diuji dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 di awal Juli 2021. Hadirnya varian baru Covid-19 yang lebih cepat menular dan mematikan, mendongkrak angka masyarakat yang terkontaminasi Covid-19 di Lampung. Hal ini memaksa pemerintah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Lampung mulai 12 Juli 2021. Kebijakan ini kembali membatasi aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah mendorong pemulihan ekonomi Lampung.

Kebijakan PPKM darurat menjadi sebuah dilematis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Pilihan yang sulit bagi pemerintah, antara menjaga kesehatan masyarakat dari serangan virus dan memulihkan ekonomi. Sulit untuk menjalankan kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. PPKM darurat membatasi aktivitas ekonomi, aktivitas belajar dan bekerja. Tak hanya itu, penutupan juga diberlakukan untuk kegiatan yang dilakukan di area publik yang dapat memunculkan kerumunan seperti taman umum, tempat wisata, dan tempat ibadah.

Ekonomi Lampung belum kembali normal. Tugas besar bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Lampung berkualitas yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dibutuhkan kerja sama semua pihak. Disiplin masyarakat selama penerapan PPKM darurat menjadi kunci.

Rilis BPS Lampung terkait Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat 13-20 Juli di Lampung menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sudah cukup baik. Artinya, jika kedisiplinan terhadap protokol kesehatan tetap dipertahankan masyarakat Lampung selama masa PPKM darurat ini, maka pemulihan ekonomi Lampung dapat segera terwujud.

Hasil survei juga menunjukkan, masih ada sebagian masyarakat yang belum melakukan vaksinasi karena khawatir dengan efek sampingnya dan tidak percaya efektivitas vaksin. Padahal, saat ini pemerintah Provinsi Lampung sedang mengusahakan percepatan dan perluasan vaksinasi. Kondisi ini tentu juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Lampung.

Percepatan dan perluasan vaksinasi yang diperkuat dengan penerapan protokol kesehatan ketat menjadi kunci utama Lampung untuk memulihkan ekonomi. Jika kepercayaan masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah dan herd immunity sudah terbentuk melalui vaksinasi, diikuti dengan pembukaan kegiatan ekonomi dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, maka pemulihan ekonomi dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi akan datang dengan sendirinya jika pandemi teratasi dengan baik. Penanganan pandemi dan kesehatan yang baik akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebaliknya, memburu pertumbuhan ekonomi dengan melalaikan kesehatan mengakibatkan pandemi tidak terkendali, sehingga ekonomi kembali jatuh dan tertekan.

Tanggal Terbit : 27 September 2021

Media : kumparan.com

Tautan : <https://kumparan.com/febiyana-qomariyah/ekonomi-tumbuh-di-tengah-ppkm-mungkinkah-1wbuGh1TdWb>

Generasi Milenial Dongkrak Sektor Pertanian

Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Sebuah kalimat legenda yang pernah dilontarkan oleh tokoh nasional, Bung Karno, menjadi relevan dengan target pemerintah untuk melahirkan 2,5 juta petani milenial pada 2024. Di sisi lain, pemerintah juga berharap adanya peningkatan produktivitas pertanian melalui program Smart Farming Millennials guna menciptakan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi covid-19. Nampaknya hal ini sangat rasional. Mengapa?

Indonesia merupakan negara agraris. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 13,70 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor pertanian. Indonesia juga punya modal yang cukup besar dari sisi penduduk usia muda. Sensus Penduduk 2020 mencatat sebanyak 25,87 persen penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Dari sisi tenaga kerja, BPS juga mencatat bahwa pada Februari 2021 sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia (29,59 persen).

Sayangnya, dominasi tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tidak diimbangi oleh kualitas SDM di dalamnya. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018 menunjukkan bahwa 65,82 persen kepala rumah tangga usaha pertanian di Indonesia berusia lebih dari 45 tahun.

Merangkul generasi milenial untuk berkecimpung di sektor pertanian merupakan momentum yang tepat dilakukan saat ini. Saatnya menghadirkan generasi muda sebagai petani yang cerdas, produktif, melek teknologi dan modern. Ini dilakukan agar profesi petani tidak hanya didominasi oleh penduduk usia tua saja. Selain itu, ancaman hilangnya profesi petani di masa yang akan datang menjadi kekhawatiran tersendiri. Padahal, sektor pertanian menjadi tumpuan ketahanan pangan nasional.

Karakteristik generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital dan media sosial dinilai mampu mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Generasi milenial menghadirkan inovasi di sektor pertanian. Misalnya dengan teknologi seperti penginderaan jarak jauh (remote sensing) untuk mengamati berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti cuaca, jenis tanah, dan kelembaban tanah. Hal inilah yang membuat adanya ketepatan dan

keakuratan di sektor pertanian. Karena segala prosesnya berbasis data dan menerapkan sistem otomasi.

Berbeda dengan sistem pertanian tradisional yang hanya menerapkan naluri dalam pengelolaan lahan pertanian. Seperti pada proses menanam tanaman tertentu membutuhkan pupuk jenis tertentu sebanyak sekian kg untuk sekian hektar, tanpa memperhatikan kondisi dan jenis tanahnya seperti apa. Hal ini dilakukan secara turun temurun, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak maksimal. Dengan pertanian modern yang berbasis data, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kebutuhan pupuk pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, sehingga penggunaan pupuk bisa lebih efisien.

Selain itu, pemanfaatan artificial intelligence dengan menciptakan robot yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tanaman dapat diterapkan pada sektor pertanian. Ataupun dengan menciptakan robot yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi pertanian. Sehingga kesan kotor, panas dan jorok pada sektor pertanian akan hilang dengan pemanfaatan teknologi.

Generasi milenial berpotensi melakukan sesuatu yang lebih terbuka. Generasi milenial lebih mudah menerima perubahan. Mereka memiliki banyak sudut pandang baru. Mereka juga lebih fleksibel dan dinamis dalam menghadapi tantangan.

Tak hanya itu, inovasi rantai pasok juga berperan penting untuk menciptakan efisiensi pasokan dan permintaan pasar terhadap hasil pertanian. Munculnya berbagai digital platform sebagai wadah yang mempertemukan petani dan konsumen atau pedagang lain, dinilai dapat memperpendek rantai pasok. Melalui digital platform, pemasaran hasil pertanian menjadi lebih mudah dengan proses pengiriman yang efisien, sehingga ada kesesuaian yang lebih baik antara produsen dan konsumen atau pedagang lain.

Hadirnya generasi milenial di sektor pertanian setidaknya memberi harapan akan masa depan sektor pertanian yang lebih cerah meski masih ada tantangan di masa depan. Pandemi covid-19 menyadarkan kita untuk kembali memberi perhatian serius terhadap peningkatan sektor pertanian. Sebab, sektor yang cenderung diabaikan ini menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh positif di tengah hantaman pandemi.

Mengutip data BPS, saat sektor lain mengalami kontraksi di sepanjang tahun 2020, sektor pertanian tumbuh 1,75 persen (y-o-y). Trend pertumbuhan positif ini terus berlanjut di kuartal 1-2021, sektor pertanian tumbuh 2,95 persen (y-o-y), sementara sektor lain masih mengalami kontraksi. Demikian juga halnya saat Indonesia keluar dari resesi di kuartal 2-2021, sektor pertanian tetap tumbuh 0,38 persen (y-o-y).

Keberlangsungan sektor pertanian adalah keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk generasi milenial. Oleh karena itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk kemajuan sektor pertanian yang digerakan oleh generasi milenial. Peningkatan kualitas SDM generasi milenial di bidang pertanian sangat berguna untuk mengembangkan sektor pertanian. Kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan dengan sasaran utama generasi milenial diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha generasi milenial di sektor pertanian. Tak hanya pandai bertani, generasi milenial di sektor pertanian pun mampu berbisnis pertanian secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi.

Selain itu, dukungan permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani generasi milenial juga diperlukan guna menunjang berbagai kegiatan pertanian sekaligus meningkatkan nilai jual produk pertanian. Secara umum dan sebagai penunjang kegiatan pertanian, KUR ini tidak hanya dikhususkan bagi petani generasi milenial saja, namun juga petani lainnya. Ketersediaan infrastruktur berupa jaringan internet yang baik juga mutlak diperlukan. Hal ini akan memperlancar proses pemasaran produk pertanian melalui digital platform hingga seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Inovasi generasi milenial di sektor pertanian diperlukan untuk menciptakan sektor pertanian yang kokoh dan mampu menciptakan ketahanan pangan nasional. Jadi, masih berpikir ulang untuk menjadi petani?

Tanggal Terbit : 28 Oktober 2021
Media : wartalampung.com
Tautan : <https://www.wartalampung.id/generasi-milenial-dongkrak-sektor-pertanian.html>

<https://lampung.bps.go.id>



Gun Gun Nugraha, S.Si., M.S.E.
Statistisi Ahli Muda Subkoordinator Fungsi
Analisis Statistik Lintas Sektor
BPS Provinsi Lampung

Bonus Demografi, Makmur Ekonomi?

Hubungan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sering kali menjadi perdebatan. Peterson (2017) dalam *The Role of Population in Economic Growth* menjelaskan bahwa hubungan kedua variabel tersebut masih *debatable* di kalangan peneliti. Hal ini diamini Menike (2018) dalam *A Literature Review on Population Growth and Economic Development*.

Pada wilayah tertentu, besarnya jumlah penduduk menjadi hambatan perkembangan ekonomi terutama ketika dihubungkan dengan pendapatan per kapita. Mengapa? Karena "kue ekonomi" negara pembaginya penduduk yang banyak sehingga menjadi kecil nilai pendapatan per kapitanya. Terlebih penduduk tersebut terjebak dalam ketidakproduktifan. Sementara itu, pada wilayah lain, besarnya jumlah penduduk justru dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena penduduk yang besar menyimpan potensi tenaga kerja yang luar biasa. Ketika negara mampu menyerapnya, maka ekonomi dapat mengalami pertumbuhan yang lebih akseleratif.

Dalam teori kependudukan, suatu wilayah pada saat tertentu dapat mengalami kondisi di mana jumlah penduduk usia kerjanya (usia 15–64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk bukan usia kerja (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Apabila penduduk usia kerja jumlahnya dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah penduduk bukan usia kerja maka wilayah tersebut sedang menikmati bonus demografi (*demographic dividend*). Dengan kata lain, bonus demografi terjadi ketika nilai beban ketergantungan (*dependency ratio*) wilayah tersebut mencapai nilai di bawah 50 persen atau ketika dua orang produktif dapat menanggung maksimal satu orang tidak produktif.

Dalam publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia Umur Tertentu dan Umur Satu Tahunan 2010–2025 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 Hasil SUPAS 2015 yang dirilis BPS, Bappenas, dan UNFPA tergambar bahwa tren kependudukan Indonesia menunjukkan penurunan angka beban ketergantungan. Hal ini mengantarkan terbukanya jendela peluang (*window opportunity*) di Indonesia yang pada saatnya akan mencapai level di mana bonus demografi akan terjadi.

Pada periode tahun 2020–2030 Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi. Sebagian studi menjelaskan bahwa puncak demografi di Indonesia akan terjadi pada tahun 2025. Pada tahun tersebut beban ketergantungan mencapai 44, atau untuk setiap 100 penduduk bekerja akan menanggung 44 penduduk yang tidak produktif.

Bonus demografi bisa menjadi beban pemerintah bila negara tidak mampu mengoptimalkannya. Lalu bagaimana negara semestinya menyambut bonus ini terutama jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, peluang atau tantangan?

Studi yang dilakukan Misra (2015) pada negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) dan Uni Eropa dalam *Impact of Demographic Dividend on Economic Growth: A Study of BRICS and the EU* menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi berhubungan secara positif. Menurut Nugraha (2016) dalam *The Impact of Human Capital Density on Per Capita Income Convergence of Regencies/Cities in Indonesia*, jumlah penduduk yang besar tidak menjadi masalah ketika modal manusia yang dimiliki wilayah memiliki level yang tinggi.

Untuk menghadapi bonus demografi beberapa langkah strategis harus segera diambil pemerintah. Sebagai kebutuhan fundamental, penguatan pendidikan secara formal harus terus didorong, bukan semata wajib belajar 9 tahun tetapi mendorong agar siswa mau belajar sepanjang hayatnya. Mengapa? Karena pendidikan adalah dasar segalanya, modal utama dalam kompetisi global. Oleh sebab itu pemerataan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, dan program bantuan seperti beasiswa harus menjadi prioritas pemerintah.

Kedua, mendorong dan meningkatkan program pelatihan vokasi atau program berbasis keterampilan dan kompetensi baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun media-media lain seperti magang dan merangsang kewirausahaan (enterpreneurship). Tujuannya agar penduduk usia kerja siap masuk ke pasar kerja. Di samping penguatan skill pada tingkat tenaga kerja, hal terpenting lainnya adalah pembukaan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan tercipta karena adanya lowongan pekerjaan baik dengan cara mendatangkan investor atau kemudahan berwirausaha.

Dukungan sarana dan prasarana juga tidak kalah penting. Sarana dan prasarana yang memadai memancing orang untuk datang berinvestasi dan memudahkan tenaga kerja dalam mengakses pekerjaan. Terakhir penguatan program research and development (R&D) melalui alokasi pembiayaan yang memadai baik di tingkat pemerintah maupun swasta yang lebih intensif.

Bonus demografi yang tengah hadir di tengah-tengah kita semestinya dapat kita optimalkan sedemikian rupa. Siklus kehadirannya tidak reguler (secara teori sangat bergantung total fertility rate (TFR) dan migran usia produktif). Bonus demografi setidaknya dapat memengaruhi penyediaan tenaga kerja

(*labor supply*), jumlah tabungan (*savings*), penguatan modal manusia (*human capital*), dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Impelentasi kebijakan yang tepat seperti regulasi pro peningkatan skill tenaga kerja, peningkatan stimulus investasi, revitalisasi sarana prasarana penunjang, serta menciptakan kondisi politik yang stabil dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi *optimum in performance* atau *fullspeed* dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Jika tidak, bonus demografi hanya akan menjadi bencana bersama. Mari berbenah mumpung belum terlambat. Bonus demografi, semestinya makmur ekonomi.

Tanggal Terbit : 21 Maret 2021

Media : wartalampung.id

Tautan : <https://www.wartalampung.id/bonus-demografi-makmur-ekonomi.html>

Mengapa NTP Lampung Rendah?

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. Dalam metode penghitungan di Badan Pusat Statistik (BPS), NTP didapat dengan cara membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Indeks harga yang diterima merupakan nilai yang diterima petani dari hasil produksi pertaniannya sementara indeks harga yang dibayar merupakan nilai yang dibayar petani untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) ditambah barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani.

Secara matematis sederhana, jika indeks harga yang diterima lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar maka dapat diartikan petani mengalami surplus atau mendapat keuntungan. Jika sebaliknya, maka artinya petani merugi.

Pada penghitungan indeks harga BPPBM variabel yang menjadi indikator adalah harga bibit; pupuk, obat, dan pakan; biaya sewa; transportasi; penambahan barang modal; dan upah buruh. Sementara pada penghitungan indeks harga konsumsi rumah tangga pertanian, variabelnya adalah keperluan bahan pokok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olah raga; dan transportasi dan komunikasi. Pada sisi lain, harga yang diterima merupakan harga hasil produksi pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Nilai Tukar Petani (NTP) tahunan Provinsi Lampung pada 2020 berada pada angka 94,73, terendah di Sumatera. Provinsi urutan terendah kedua adalah Sumatera Selatan, 95,37. Nilai Tukar Petani (NTP) tahunan tertinggi adalah Provinsi Riau dengan capaian 118,77. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan NTP Provinsi Lampung rendah?

Berdasarkan data tahun 2020, indeks harga yang dibayar petani Lampung pada tahun 2020 di level Sumatera mencapai 105,81 atau kedua tertinggi di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Barat 105,92. Besarnya indeks harga yang dibayar petani di Lampung lebih disebabkan karena indeks harga BPPBM dan konsumsi rumah tangga petani di Lampung juga ternyata menunjukkan nilai yang cukup tinggi.

Indeks harga yang dibayar berupa BPPBM Provinsi Lampung mencapai 104,75 atau berada pada urutan tertinggi kedua di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu yang mencapai 106,32. Terendah adalah Provinsi Riau yang hanya mencapai 103,08. Indeks tertinggi variabel BPPBM pada bulan Desember 2020 adalah pada Upah Buruh yang mencapai 107,35 disusul indeks Sewa dan Pengeluaran Lainnya yang mencapai 105,96.

Untuk indeks harga konsumsi rumah tangga mencapai 106,38 atau provinsi kedua tertinggi setelah Sumatera Barat yang mencapai 106,51. Indeks pengeluaran rumah tangga petani tertinggi adalah pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mencapai 111,40 dan kedua adalah kelompok Kesehatan yang mencapai 110,70.

Arah berlawanan justru terjadi pada indeks harga yang diterima petani. Data pada tahun 2020, indeks harga yang diterima petani Lampung hanya mencapai 100,23, paling rendah di Sumatera. Provinsi di Sumatera dengan capaian indeks harga yang diterima petani tertinggi adalah Riau yang mencapai 124,78.

Indeks harga yang diterima terendah pada bulan Desember 2020 terjadi pada sub sektor tanaman pangan yang hanya mencapai 99,03. Enam sub sektor lainnya berada pada nilai di atas 100,00. Namun, karena sub sektor tanaman pangan memiliki bobot yang lebih tinggi dibanding sub sektor lainnya maka memberikan efek yang cukup besar terhadap NTP gabungan Provinsi Lampung.

Berdasarkan catatan di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyebab NTP rendah di Lampung adalah karena biaya untuk ongkos produksi dan konsumsi rumah tangga petani di Lampung lebih tinggi dibanding provinsi lainnya. Kemudian diikuti dengan rendahnya harga-harga hasil produksi petani (harga yang diterima).

Bengkulu dan Sumatera Barat masing-masing memiliki biaya ongkos produksi dan konsumsi rumah tangga petani yang lebih tinggi dari Lampung namun biaya yang diterima atau harga hasil produksi di sana lebih tinggi sehingga memiliki NTP yang tetap lebih baik dibandingkan Lampung.

Melihat fenomena di atas, rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan di Lampung?

Pertama, menjaga stabilitas harga produksi pertanian. Langkah ini sangat penting mengingat, ini adalah kata kunci agar biaya yang diterima petani dapat terjaga. Kapan waktu yang tepat pemerintah melakukan impor beras misalnya perlu menjadi pertimbangan agar harga hasil panen petani terjaga. Kedua, membantu petani untuk meringankan ongkos produksi terutama pada penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, traktor, upah buruh, dan lain sebagainya. Ketiga menjaga stabilitas harga-harga pada komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga pertanian.

Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah gencar memberikan bantuan dan subsidi bagi para petani untuk merealisasikan Rakyat Lampung Berjaya. Semoga program pemerintah tersebut dapat memberikan solusi terbaik dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani Lampung. Semoga saja.

Tanggal Terbit : 24 Maret 2021
Media : Radar Lampung
Tautan : -

Membangkitkan Budaya Literasi

Potret budaya membaca masyarakat Indonesia tergolong memprihatinkan. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018 yang dilakukan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan skor literasi kita masih rendah. Survei PISA tersebut menyoroti siswa pendidikan menengah yang difokuskan pada pengukuran tiga kompetensi dasar, yaitu literasi, matematika, dan sains.

Skor kemampuan membaca siswa Indonesia mencapai 371, masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 487. Kemampuan membaca siswa Indonesia hanya setara dengan Arab Saudi, Kosovo, Republik Dominika, Kazakhstan, dan Filipina. Negara dengan skor kemampuan membaca tertinggi adalah Tiongkok (555), disusul Singapura (549), dan Makau (525). Kondisi yang sama juga terjadi pada kemampuan siswa terhadap matematika dan sains.

Fakta lain disodorkan oleh UNESCO dan Central Connecticut State University. Menurut hasil survei yang diselenggarakan UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya mencapai 0,001. Artinya, dari setiap 1.000 orang, hanya satu orang yang berminat membaca. Riset Central Connecticut State University pada tahun 2016 menyebutkan bahwa literasi masyarakat Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah atau setingkat lebih baik dari Botswana.

Sementara itu, hasil Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan tahun 2018 oleh BPS, menyebutkan bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang membaca selama seminggu terakhir mencapai 77,94 persen atau dari setiap 100 orang, yang membaca selama seminggu terakhir mencapai 77 orang. Ini pun kondisinya didominasi oleh anak sekolah dan mahasiswa karena rutinitas di sekolah/kampus. Berdasarkan tipe daerah, masyarakat perdesaan mencapai 72,07 persen, sedangkan perkotaan mencapai 82,65 persen. Dari sisi jenis kelamin, minat baca penduduk laki-laki lebih rendah (77,00 persen) daripada penduduk perempuan (78,89 persen).

Masih rendahnya tingkat baca tulis (literasi) di Indonesia disinyalir karena masyarakat belum menyadari manfaatnya. Padahal, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi berangkat dari minat membaca dan menulis. Di samping itu, dampak lain dari rendahnya budaya membaca adalah semakin terbukanya potensi risiko yang tinggi terhadap transfer konten negatif di era digital. Berita *hoax*, ujaran kebencian, isu radikalisme, isu intoleransi merupakan ancaman di tengah masyarakat yang gagap membaca.

Sebuah survei dari CIGI-Ipsos pada tahun 2016 menjelaskan bahwa sekitar 65 persen dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa cek dan ricek.

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Di Italia dikenal istilah *grandi lettori*. Istilah ini digunakan bagi anak-anak sebagai pembaca yang hebat. Membaca sudah menjadi budaya dalam keluarga. Indikatornya, keluarga di sana menjadikan pembelian buku, komik, dan koran sebagai pengeluaran rutin keluarga. Tidak heran jika di sana banyak lahir para pujangga dan ilmuwan terkemuka. Di Indonesia, masih menurut survei BPS, sebanyak 86,77 persen penduduk Indonesia berumur 5 tahun ke atas menghabiskan 6–7 hari setiap minggu untuk menonton siaran televisi.

Kedua, akselerasi perkembangan teknologi yang makin cepat. Perkembangan teknologi yang makin canggih dan cepat turut menjadi penyebab menurunnya budaya literasi. Masyarakat disinyalir lebih tertarik bermain game pada gawai mereka dibandingkan membaca. Jika pun membaca, sebagian masyarakat lebih tertarik membaca gosip dan konten media sosial yang kadangkala kebenarannya masih belum jelas dan minim basis saintifik. Siauxeni (2010) menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam meningkatkan kegemaran membaca anak adalah derasnya arus hiburan serta permainan dari gawai.

Ketiga, minimnya sarana bacaan. Perpustakaan dan taman baca masyarakat (TBM) merupakan sarana bacaan yang paling mudah diakses masyarakat. Faktanya, tidak sedikit sarana bacaan justru sepi peminat. Menurut BPS, persentase penduduk Indonesia berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengunjungi perpustakaan selama tiga bulan terakhir hanya mencapai 13,02 persen dan taman baca masyarakat (TBM) hanya mencapai 1,15 persen. Pemicunya, selain disebabkan karena minat baca masyarakat yang masih kurang, kondisi sarana bacaan yang kurang menarik, buku-buku yang ada juga masih sekumpulan buku-buku lama, dan sistem peminjaman yang terkesan kurang bersahabat. Munaf (2002) dalam studinya pernah menyatakan bahwa perpustakaan memiliki hubungan yang erat dalam menumbuhkan minat baca.

Keempat, kurangnya motivasi dari personal. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa membaca seperti membuang waktu percuma. Bagi masyarakat menengah ke bawah, membaca bukanlah aktivitas yang harus diprioritaskan. Bagi mereka, waktu untuk bekerja jauh lebih penting dibandingkan waktu untuk membaca. Oleh sebab itu, mind set anak-anak pada masyarakat golongan ini akhirnya mengikuti pola pikir orang tua mereka.

Melihat kondisi perkembangan budaya membaca di Indonesia yang masih rendah, langkah-langkah konkret harus segera diambil pemerintah. Kebijakan dan dukungan semestinya tidak lagi hanya sebatas temporer atau seremonial saja, seperti perayaan Hari Buku Nasional. Impelementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang perpustakaan harus terus didorong agar budaya literasi semakin berkembang. Alternatif kedua adalah dengan mewajibkan siswa untuk membaca minimal 2–3 buah buku per minggu sehingga lambat laun ini akan menjadi budaya yang biasa di masyarakat. Selanjutnya, perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah di Indonesia juga harus terus dibenahi agar disparitasnya seminim mungkin. Langkah lain adalah dengan menggandeng swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, duta membaca agar sosialisasi program literasi menjadi lebih masif dan terarah.

Meningkatkan kemampuan literasi adalah PR kita bersama. Membudayakan baca dan tulis merupakan salah satu upaya agar sumber daya manusia masyarakat dapat berkembang secara mandiri dan alami. Kita tentu berharap dengan semakin meningkatnya budaya literasi di tengah masyarakat kita, Indonesia mampu bersaing pada level yang lebih luas. Dengan jumlah populasi yang mencapai 271,62 juta jiwa dibarengi dengan tingkat SDM yang handal, ke depan, Indonesia adalah negara yang akan diperhitungkan dunia. Mari, bangkitkan budaya literasi di tengah kita! Tidak ada kata terlambat.

Tanggal Terbit : 24 Maret 2021

Media : wartalampung.id

Tautan : <https://www.wartalampung.id/membangkitkan-budaya-literasi.html>

Sejahteralah Nelayan Indonesia

Menurut Sumber Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, total luas wilayah Indonesia adalah 5,19 juta km². Luas daratan mencapai 1,92 juta km² dan luas lautan mencapai 3,27 juta km². Referensi lain menyebutkan, luas perairan Indonesia hampir tiga kali lipat luas daratannya. Kondisi ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah yang cukup besar.

Namun demikian, apakah potensi maritim Indonesia, terutama pada subsektor perikanan, sudah dimanfaatkan secara optimal? Menurut data BPS, nilai PDB Subsektor Perikanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai 254,11 triliun rupiah (gabungan perikanan tangkap dan budidaya). Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia mencapai 2,80%. Menurut beberapa ahli kelautan, nilai tambah subsektor perikanan masih sangat potensial untuk terus dioptimalkan. Salah satu indikatornya, tahun 2020 pertumbuhan subsektor perikanan masih bertahan positif di tengah pandemi Covid-19 dengan capaian 0,73%.

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai seperempat milyar lebih, tepatnya 271,62 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar, ditambah hamparan maritim kita yang sangat potensial, semestinya konsumsi produk perikanan di Indonesia cukup menjanjikan. Faktanya, berdasarkan Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2011, konsumsi ikan per kapita Indonesia justru masih sangat rendah dibandingkan dengan konsumsi negara berkembang lainnya.

Menurut laporan tersebut, konsumsi ikan masyarakat Indonesia tahun 2011 hanya mencapai 32,25 kg per tahun atau sekitar 0,09 kg per hari. Sementara Malaysia, mencapai 55,40 kg per tahun. Kabar baiknya, pertumbuhan konsumsi ikan per kapita Indonesia mencapai 5,04% sedangkan Malaysia hanya mencapai 1,26% per tahun. Besarnya pertumbuhan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi ikan semakin membaik.

Data 2020, dalam publikasi BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2020, konsumsi per kapita ikan dan udang segar serta konsumsi per kapita ikan dan udang diawetkan sudah mencapai 38,42 kg per tahun atau sekitar 0,11 kg per hari. Jika kita bandingkan dengan rekomendasi ideal konsumsi ikan per kapita menurut WHO, yaitu 32,70 kg per tahun atau setara

dengan 12,89 gram protein per hari, maka sesungguhnya batasan minimal konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia sudah terpenuhi.

Dari sisi suplai, menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, jumlah produksi ikan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 23,13 juta ton. Jumlah tersebut gabungan antara produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap mencapai 7,36 juta ton (31,82%) dan produksi perikanan budidaya mencapai 15,77 juta ton (68,18%).

Angka total produksi tersebut jika dibandingkan dengan sisi kebutuhan konsumsi, produksi ikan di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri sepenuhnya. Berlebihnya stok, dibuktikan dengan nilai ekspor komoditas ikan segar/dingin hasil tangkap yang mencapai 53,91 ribu ton atau 125,09 juta US\$ pada tahun 2019. Belum lagi komoditas lain seperti kepiting, cumi-cumi, dan udang.

Kesejahteraan Nelayan

Sebuah studi menjelaskan bahwa jumlah kepala rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan di Indonesia berkisar 2,00–2,50% dari jumlah total kepala rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah (ART) berjumlah sekitar empat orang. Nelayan tinggal dan tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan.

Menurut Imron, dalam Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan (2003), sebagian besar nelayan Indonesia hidup dalam kemiskinan. Mereka bermanifestasi dalam beberapa dimensi: ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Determinan penyebab kemiskinan adalah keterbatasan alat tangkap yang jauh dari kata modern dan ketergantungan nelayan pada tengkulak (pedagang ikan).

Secara sosial, kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan. Kondisi ini terutama dialami oleh buruh nelayan dan nelayan perorangan. Kemiskinan bukan hanya dalam lingkup keluarga saja melainkan juga dalam lingkup desa yang terwujud dalam bentuk kemiskinan prasarana. Padahal jika kita hubungkan antara potensi maritim yang melimpah, pertumbuhan konsumsi ikan di masyarakat yang kian naik, semestinya tingkat kemakmuran nelayan kita saat ini harus sudah semakin membaik.

Program intervensi pemerintah dalam upaya menyejahterakan nelayan yang selama ini sudah berjalan harus terus dipertajam dan dipercepat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka adalah dengan mengembangkan kapasitas alat tangkap seperti bantuan perahu, jaring, keramba, dan sebagainya yang lebih modern.

Upaya pemerintah dalam menjaga nilai tukar nelayan (NTN) sudah cukup baik. Jika kita lihat kondisi Desember 2020, NTN mencapai 101,72 (2018 = 100). Artinya, nilai yang diterima nelayan lebih tinggi dibanding nilai yang dibayar. Demikian halnya dengan nilai tukar usaha nelayan (NTUN) yang berada pada nilai 102,90.

Ketergantungan nelayan pada tengkulak juga harus diminimalisasi pemerintah untuk mengembangkan posisi tawar nelayan seperti kemudahan paket kredit usaha perikanan. Ketergantungan pada tengkulak merupakan permasalahan lain yang dihadapi oleh nelayan. Akibatnya posisi tawar (bargaining position) yang dimiliki oleh nelayan sangat rendah, sehingga hasil tangkapan yang dijual oleh nelayan juga dihargai lebih rendah daripada harga pasar. Dengan demikian pendapatan yang diterima oleh nelayan juga rendah. Walaupun di beberapa tempat sudah ada TPI sehingga diharapkan dapat mengontrol harga ikan, namun dalam praktiknya keberadaan TPI malahan menjadi beban nelayan karena pungutan retribusi termasuk ketika lelang tidak berjalan.

Di samping itu, patroli untuk mengusir para nelayan pencuri di perairan Indonesia juga harus terus diintensifkan agar produksi ikan kita tidak terganggu. Termasuk penghancuran kapal-kapal asing pencuri ikan agar dapat memberikan efek jera.

Kita berharap semoga upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia. Sejarah pernah membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut tangguh.

Selamat Hari Nelayan, 6 April 2021. Sejahteralah nelayan Indonesia!

Tanggal Terbit : 6 April 2021
Media : wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/sejahteralah-nelayan-indonesia.html>

Bila Sembako Kena Pajak

Sembilan bahan pokok (sembako) yang terdiri dari beras, minyak goreng, sayur dan buah, gula, garam, daging, susu, telur, dan gas elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang hampir tidak mungkin tergantikan. Guncangan harga yang terjadi pada salah satu saja komoditas sembako tersebut dapat membuat geger seantero negeri. Apatah lagi pada sebagian besar komoditas lainnya, bisa membawa ancaman pada konflik sosial yang jauh lebih dalam. Oleh sebab itu, stabilitas harga sembako harus menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kondisi sosial yang kondusif.

Belum lama ini kita disuguhkan berita yang menjelaskan bahwa ke depan sembako, pendidikan, dan kesehatan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentu informasi ini kemudian menjadi heboh dan gaduh di tengah masyarakat. Terlebih dalam suasana ekonomi yang dirasa serba sulit akibat pandemi Covid-19.

Berita tersebut seolah menjadi pukulan telak bagi masyarakat. Sebagian masyarakat mengecap pemerintah tidak memiliki rasa empatik terutama pada kalangan ekonomi bawah meskipun melalui Staf Khusus Menteri Keuangan sudah dijelaskan bahwa keinginan tersebut masih berupa wacana dan jika pun direalisasikan baru akan berlaku tahun depan dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah menurun.

Kegaduhan di tengah masyarakat tentu bukan tanpa alasan. Bila benar wacana tersebut diimplementasikan himpitan ekonomi masyarakat akan semakin sesak. Lalu apa dampak yang mungkin terjadi jika ini tetap direalisasikan?

Pertama, hadirnya PPN sembako dimungkinkan akan mendorong inflasi yang lebih tinggi. Harga-harga akan naik. Mengapa? Karena harga bahan pokok yang kena pajak akan lebih tinggi dari seharusnya. Permasalahan lainnya, kenaikan harga bukan hanya sekedar komoditas sembako saja namun efek turunannya turut terjadi pada komoditas lainnya. Kondisi ini tentu akan menurunkan daya beli masyarakat apalagi ketika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ekonom Direktur *Center of Economic and Lawa Studies* (CELIOS), Bhima Yudhistira, dalam *finance.detik.com* mengilustrasikan secara sederhana. Misalnya, beras dikenakan PPN 1%. Jika kita ambil harga beras di pasaran per kg saat ini adalah Rp10.000,00 maka harga beras setelah dikenakan PPN akan

menjadi Rp10.100,00. Apakah ada jaminan si penjual akan menjual beras tersebut dengan harga Rp10.100,00? Psikologis pasar tentu akan membulatkannya menjadi Rp10.500,00 atau Rp11.000,00. Ini artinya, inflasi beras tersebut bukan di angka 1% namun bisa menjadi 5% lebih. Bagaimana dengan komoditas lainnya? Bagaimana jika rantai pasok bermasalah?

Masalah selanjutnya adalah kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Rumah tangga akan cenderung menahan konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier akibat memperjuangkan kebutuhan primer yang *cost*-nya meningkat. Menurut catatan BPS, pada tahun 2020 peran konsumsi rumah tangga dalam PDB Indonesia mencapai 57,66%, terhitung sangat dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, kemiskinan meningkat. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 mencapai 10,19% (27,55 juta orang).

Dalam struktur penentuan garis kemiskinan yang dianut BPS, variabel garis kemiskinan makanan di Indonesia pada September 2020 masih memiliki *share* yang lebih besar ketimbang garis kemiskinan bukan makanan. Angka perbandingannya mencapai 73,86% untuk garis kemiskinan makanan banding 26,13% untuk garis kemiskinan bukan makanan.

Dalam garis kemiskinan makanan tersebut, baik wilayah perdesaan dan perkotaan, kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam ras, gula memberikan kontribusi yang masih cukup besar. Ini artinya, ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok dapat dipastikan kemiskinan akan bertambah.

Penjelasan Pemerintah Terkait Pajak Sembako

Dilansir dari kompas.com, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa rencana pungutan PPN sembako, jasa pendidikan (termasuk sekolah), dan jasa kesehatan memang dimasukkan dalam draft Revisi Kelima UU Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU KUP tersebut belum dibahas bersama DPR.

Masalahnya, polemik PPN untuk sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tersebut sudah *kadung* menyebar di tengah masyarakat. *Dilalahnya*, informasi yang yang diterima publik adalah informasi yang dicerna secara terpotong-potong.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu turut menjelaskan bahwa tarif PPN yang diajukan dalam RUU KUP adalah khusus bahan pangan kelas premium. Sembako non-premium yang dibeli di pasar tradisional akan terbebas dari PPN.

Beras produksi petani seperti Cianjur, Rojolele, Pandan Wangi, dan lain-lain tidak akan dikenakan pajak. Beras premium yang terkena PPN adalah beras jenis basmati dan shirataki. Demikian halnya daging, daging sapi yang dikenakan pajak adalah daging sapi Kobe dan Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat dari harga daging sapi biasa.

Ke depan tantangan Indonesia akan semakin kompleks seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Bukan sekedar target peningkatan *tax ratio* tetapi juga masalah masih besarnya ketimpangan pendapatan antarmasyarakat (*gini ratio*) yang menjadi tantangan sendiri dalam mengejar realisasi pajak terlebih di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum tuntas.

Trade off ini tentu sudah dipertimbangkan matang oleh pemerintah. Kita berharap, masih banyak alternatif atau strategi lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam pengumpulan pajak tanpa membebani masyarakat ekonomi pas-pasan. Semoga saja.

Tanggal Terbit : 21 Juni 2021
Media : www.kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/gunnugraha/bila-semako-kena-pajak-1vz8g6t6442>

Tantangan Tumbuh Kembang Anak Indonesia

Anak adalah aset keluarga. Dalam perspektif makro, anak merupakan aset bangsa. Hal ini senada dengan ucapan Oliver Tambo, aktivis anti-apartheid dari Afrika Selatan tahun 1950-an, masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada bagaimana kondisi anak-anak di negara tersebut pada masa kini. Lebih jauh, John F. Kennedy, Presiden AS periode 1961–1963 menyatakan, *children are the world's most valuable resource and its best hope for the future*. Anak-anak adalah sumber daya paling berharga di dunia dan mereka adalah harapan terbaik untuk masa depan.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) mendefinisikan anak sebagaimana dijelaskan dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Menurut UU RI nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

Berdasarkan data BPS, saat ini jumlah anak Indonesia diperkirakan mencapai 81 juta atau sekitar 30% dari penduduk Indonesia. Potensi ini terbilang cukup besar. Pada saat bersamaan, Indonesia juga tengah "menikmati" *demography dividen* 'bonus demografi'. Sebuah peluang yang tidak boleh dilewati begitu saja. Ketika banyak negara lain memiliki populasi dan tenaga kerja yang menua, dua per tiga populasi Indonesia justru berada dalam rentang usia produktif (15–64 tahun).

Populasi usia produktif yang berlimpah ini dapat menjadi mesin pembangunan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan bonus tersebut, Indonesia harus berinvestasi untuk anak-anak dan generasi muda saat ini juga. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus menjadi prioritas investasi agar tercipta generasi unggul. Jika tidak, kita akan kehilangan peluang memiliki generasi sehat, cerdas, dan terampil, sehingga kita tidak siap berkompetisi di tatanan perekonomian global masa depan. Indonesia akan semakin sulit bersaing. Oleh sebab itu, tantangan dan permasalahan yang kini dihadapi anak dan generasi muda harus segera dituntaskan.

Menurut laporan UNICEF tahun 2020, Indonesia telah berhasil meningkatkan capaian beberapa indikator seperti angka kematian ibu dan anak yang turun cukup drastis, angka partisipasi pendidikan dasar mendekati 100 persen, dan

pelayanan kesehatan dasar sudah tersedia hampir di semua wilayah, termasuk daerah terpencil. Namun demikian, tantangan dan permasalahan besar lainnya masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan “episentrum” dari hampir semua tantangan yang dihadapi anak Indonesia, mulai dari kondisi kesehatan, kesempatan bersekolah, keadaan aman dari kekerasan dan paparan polutan berbahaya hingga masalah masih banyak lagi.

Masalah kemiskinan anak Indonesia adalah masih lebarnya disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada September 2019—sebelum pandemi Covid-19—tingkat kemiskinan wilayah perdesaan (12,60%) lebih tinggi daripada wilayah perkotaan (6,56%). Dalam konteks kemiskinan multidimensi, tingkat deprivasi kemiskinan anak di desa juga lebih berisiko, seperti kekurangan sarana sanitasi, imunisasi tidak lengkap, tidak memiliki jaminan kesehatan, gizi tidak sesuai, kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar, kelahiran tidak tercatat, kondisi hunian tidak layak.

2. Kesehatan

Indikator utama kesehatan anak, seperti pada kesehatan dasar (angka kematian ibu (AKI), angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian anak, imunisasi, penanganan penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, akses layanan kesehatan reproduksi, penyalahgunaan zat, dan kesehatan jiwa); gizi (gizi rendah (*stunting*, *wasting*, berat badan kurang, anemia), gizi ibu, berat badan berlebih dan obesitas, dan gizi remaja); air, sanitasi, dan kebersihan (akses layanan air dan sanitasi dan fasilitas WASH) pada beberapa titik sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Namun, pada titik lain masih perlu perbaikan terutama pada wilayah-wilayah pedalaman, perdesaan, dan rumah tangga miskin dan capaian indikator yang masih di bawah target SDGs.

3. Pendidikan

Masalah pengembangan dan pengasuhan anak usia dini menjadi tantangan tersendiri. Data tahun 2019 mengindikasikan bahwa hanya 36,49% anak dalam rentang usia yang sesuai yang mengikuti program usia dini. Angka ini jauh di bawah target RPJMN 2015–2019 dengan target 77%. Selain itu, masalah akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas masih terbatas. Pada periode 2015–2019, angka tamat sekolah pendidikan

dasar, menengah pertama, dan menengah atas terus meningkat. Namun, masih terdapat sekitar 4,2 juta anak yang tidak bersekolah, terutama anak dari keluarga miskin dan wilayah perdesaan, serta anak dengan disabilitas.

Indikator lain seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni secara umum terus meningkat. Tantangan yang kemudian muncul adalah masalah ketimpangan. Selain itu, akses terhadap pendidikan teknis atau vokasi juga masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, kurang dari separuh anak muda Indonesia usia 15–24 tahun yang bersekolah atau menerima pelatihan.

4. Perlindungan

Tantangan dan masalah perlindungan anak diantaranya :

- a. Pencatatan kelahiran
Pada akhir tahun 2019, pemerintah telah memenuhi target untuk menaikkan pencatatan kelahiran hingga angka 85%. Namun, proporsi anak yang tidak memiliki akta kelahiran masih cukup besar, sekitar 11 juta anak tidak memiliki akta lahir (laporan UNICEF Tahun 2020).
- b. Pengasuhan anak di bawah lembaga
Komitmen untuk terus menurunkan jumlah anak yang berada di bawah lembaga pengasuhan dan sekaligus memastikan agar mereka yang harus menghuni lembaga pengasuhan menerima perawatan yang memadai harus diperkuat. Diperkirakan ada sekitar 2,2 juta anak Indonesia tidak tinggal dengan orang tua mereka.
- c. Praktik budaya yang merugikan anak
Praktik budaya yang merugikan anak juga masih ada, seperti masalah perkawinan muda pada anak perempuan. Prevalensi perkawinan anak perempuan Indonesia memang turun dengan stabil, tetapi melandai dalam tahun-tahun terakhir. Saat ini, satu dari sembilan perempuan Indonesia, usia perkawinan pertamanya adalah di bawah 18 tahun.
- d. Kekerasan dan penganiyaan terhadap anak
Hasil survei nasional mengenai kekerasan terhadap anak tahun 2018 oleh Kementerian PPPA, menjelaskan bahwa 62% anak perempuan dan anak lelaki mengalami satu atau lebih kekerasan sepanjang hidupnya. Hasil survei pun menunjukkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta 3 dari 5 anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan emosional.
- e. Kekerasan berbasis gender
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan konsistensi dengan tren global: sekitar satu dari tiga perempuan selama

hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan bukan pasangan. Survei tahun 2016 menunjukkan bahwa hampir 10 persen perempuan pernah mengalami bentuk kekerasan demikian pula dalam 12 bulan terakhir.

f. Perdagangan anak dan eksploitasi seksual

Pada tahun 2018, jumlah warga negara Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri cukup signifikan, termasuk di Asia dan Timur Tengah. Mereka ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga, pabrik, proyek konstruksi, dan masih banyak lagi. Perempuan dan anak perempuan Indonesia menjadi objek perdagangan seksual, terutama di Malaysia, Timur Tengah, dan Taiwan. Mereka juga tak luput dari perdagangan di dalam negeri, khususnya ke lokasi operasi tambang di Maluku, Papua, dan Jambi. Anak juga mengalami eksploitasi seksual di wilayah pariwisata di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura dan Bali. Menurut hasil survei U-Report yang baru, eksploitasi seksual secara daring juga mengancam remaja.

g. Pekerja anak

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggambarkan pekerja anak sebagai "anak yang terlibat dalam pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat seorang anak, dan yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya". Perbedaan antara anak bekerja dan pekerja anak bergantung pada usia anak, jenis pekerjaan, dan lingkungan kerja.

h. Anak ketika berhadapan dengan hukum

Di Indonesia, anak berusia 12 tahun dianggap dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Di sisi lain, UU Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan anak untuk mendapat representasi hukum dan pendidikan selama ditahan, tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit anak yang menerima kedua layanan ini.

5. Partisipasi Anak dan Remaja

Partisipasi dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan anak dan remaja. Mereka akan lebih merasa percaya diri, dapat membangun kekuatan melalui kolaborasi, dan aktif terlibat dalam memenuhi hak-haknya. Melalui kolaborasi, suara anak bisa menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Permasalahan dalam mewujudkan partisipasi anak dan remaja adalah karena praktik di tengah masyarakat yang tidak memandang anak dan remaja sebagai warga negara aktif.

Beberapa media bisa diterapkan untuk menjembatani interaksi antara orang dewasa dan remaja dalam bekerja sama, berpartisipasi, dan menemukan solusi

terhadap isu-isu yang berdampak pada kehidupan mereka dan lingkungan sekitarnya.

6. Bencana dan risiko lingkungan serta dampaknya terhadap anak

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling rentan terhadap bencana. Banjir, gempa bumi, dan tsunami adalah tiga bahaya alam terbesar di Indonesia. Situasi Indonesia sangat mungkin memburuk seiring dengan perkembangan perubahan iklim secara global.

Bencana alam dapat mengakibatkan anak terpisah dari orang tua, saudara, dan kawan bermain. Selain itu, anak menderita trauma emosional dan amat berisiko mengalami eksploitasi, serta penganiayaan.

Berbagai program yang disusun pemerintah telah menghasilkan capaian yang cukup baik terhadap peningkatan kualitas tumbuh kembang anak. Beberapa indikator mengalami kemajuan yang signifikan. Namun demikian, tantangan untuk menciptakan *comfortable environment for children* terus dinamis seiring perkembangan zaman.

Secara umum, tantangan yang paling menonjol terhadap capaian indikator adalah masalah disparitas. Gap antara si kaya dan si miskin, antara desa dan kota, antara wilayah pedalaman dan wilayah nonpedalaman, antara wilayah barat, tengah, dan timur. Hampir semua capaian bermasalah di seputar disparitas. Oleh sebab itu, pemerataan adalah kata kunci. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak harus diiringi dengan tindakan nyata, bukan sekadar lip service dan seremonial belaka. Penganggaran dan money harus dikawal dengan baik.

Hari Anak Nasional merupakan momen yang tepat untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selamat Hari Anak Nasional, 23 Juli 2021.

Tanggal Terbit : 25 Juli 2021
Media : www.wartalampung.id
Tautan : <https://www.wartalampung.id/tantangan-tumbuh-kembang-anak-indonesia.html>

<https://lampung.bps.go.id>



Hardianty, S.Si.
Statistisi Ahli Muda
BPS Provinsi Lampung

Usul Impor Beras di Lumbung Padi

Dikutip dari harian Lampung Post (09/03) Asosiasi Petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan impor beras. Bukan tanpa alasan permintaan ini, kebijakan impor diawal tahun yang bersamaan dengan masa panen raya tentu perlu dikaji ulang.

Sebelum memutuskan impor sebenarnya ada tiga indikator yang perlu diperhatikan. Pertama produksi beras di dalam negeri tidak mencukupi, kedua stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih kurang dan ketiga harga di pasaran mengalami kenaikan. Jika tiga indikator tersebut terpenuhi maka kebijakan impor sudah sewajarnya dilakukan. Semua pihak akan memahami dan tidak menimbulkan perdebatan, tetapi apakah kondisi di lapangan memenuhi kriteria tersebut?

Selama ini keputusan impor beras selalu menjadi polemik salah satunya karena data yang digunakan. Pengembangan metode Kerangka Sampel Area (KSA) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa lembaga lain telah mampu menjawab permasalahan ini dari sisi produksi. Keakuratan untuk menghitung produksi dan memperkirakan potensi panen sudah bisa digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan data BPS produksi Gabah Kering Giling (GKG) nasional tahun 2020 sebanyak 54,65 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 45,17 ribu ton (0,08 persen) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019. Sedangkan untuk potensi produksi gabah pada Januari-April sebanyak 25,37 juta ton lebih tinggi 26,88 persen dibandingkan tahun lalu.

Provinsi Lampung sendiri masuk sebagai sepuluh besar produksi padi nasional. Tahun 2020 produksi mencapai 2,65 juta ton GKG, naik 486,20 ribu ton atau sebesar 22,47 persen. Sedangkan potensi produksi Januari-April 1,36 juta ton GKG, naik 61,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini tentu menjadi berita baik untuk Indonesia di masa pandemi ini. Kerja keras petani dan peran pemerintah untuk mendukung kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Namun apakah para petani menikmati keberhasilan ini?

Mulai dari Bulan Maret hingga Mei 2021 petani padi memasuki masa panen raya. Saat itu produksi mencapai puncaknya. Sebagaimana hukum pasar, melimpahnya ketersediaan membuat harga turun. Jika melihat data tahun lalu harga gabah di masa panen raya ada dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020. Contohnya pada bulan Mei 2020 harga gabah di salah satu kecamatan di Provinsi Lampung hanya Rp. 3.700,00 per kilogram jauh dibawah HPP yaitu sebesar Rp.4200,00 per kilogram.

Secara nasional Bulan Februari 2021 rata-rata harga Gabah Kering Penen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 4.758,00 sudah menunjukkan penurunan 3,31 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Harga terendah ada di Provinsi Sulawesi Utara yang hanya Rp. 3.450,00. Berkaca dari tahun sebelumnya bukan tidak mungkin harga akan kembali turun di bulan-bulan mendatang selama panen raya.

Penurunan harga tentu berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan petani. Indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani akan tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). NTP lebih besar dari 100 dapat dimaknai pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika kurang dari 100 pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya.

Secara nasional NTP tanaman pangan pada Bulan Februari sebesar 99,21, mengalami penurunan sebanyak 0,84 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan Provinsi Lampung mengalami kenaikan 0,06 persen menjadi 93,30. Walaupun naik tapi masih jauh dari 100. Artinya petani belum sejahtera.

Petani adalah pejuang pangan yang sepatutnya diapresiasi. Tetesan peluh dan kelelahan saat di sawah akan terbayar saat harga gabah dipasaran sesuai harapan. Faktanya panen raya selalu dihadapkan pada harga yang rendah.

Kesejahteraan petani harus menjadi perhatian serius jika ingin mencapai kedaulatan pangan. Harapan tentang hasil yang akan didapat pasti menjadi dorongan tersendiri untuk merawat tanamannya sebaik mungkin. Sebaliknya harga yang turun akan menyulitkan petani untuk modal produksi periode berikutnya. Jangankan untuk membeli pupuk, untuk keperluan sehari-hari saja sulit terpenuhi.

Jika dibiarkan terus-menerus hal ini akan berdampak pada regenerasi petani. Perlu tangan-tangan anak muda terampil yang memiliki pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan sektor pertanian. Akan tetapi jika masih saja prospek ke depannya kurang baik, siapa yang akan tertarik? Bertani karena memilih menjadi petani berbeda dengan menjadi petani karena tidak ada pilihan lain.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) idealnya berkisar antara 1 hingga 1,5 juta ton. Hingga akhir Februari stok CBP Bulog mencapai hampir satu juta ton. Jika khawatir dengan cadangan beras dalam negeri Bulog dapat menyerap beras secara optimal dari petani. Bukankah lebih baik mensejahterakan petani negeri kita sendiri daripada petani dari negeri lain? Tentu saja dengan lebih memperhatikan distribusi dan proses penyimpanannya.

Solusi dari polemik ini adalah kaji ulang kebijakan impor beras. Baru sebatas informasi akan ada impor sudah membuat harga gabah turun. Apalagi jika impor benar dilaksanakan pada saat panen raya.

Keputusan perlu atau tidaknya impor akan lebih pas jika sudah mengevaluasi data di bulan Juli hingga Agustus. Panen raya sudah berakhir dan ketersediaan pangan bisa dilihat. Mudah-mudahan saja hasilnya tetap tidak perlu impor.

Jika hal itu terjadi, rasanya mewujudkan kedaulatan pangan dan petani berjaya bukan lagi sekedar angan.

Tanggal Terbit : 25 Maret 2021
Media : infra-merah.com
Tautan : <https://infra-merah.com/2021/03/25/usul-impor-beras-di-lumbung-padi/>

Hari Pengendalian Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunai 2021

Tanggal 17 Juni telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Awalnya peringatan hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi majelis Umum A/RES/49/115 di tahun 1994. Tujuan dari peringatan hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah degradasi lahan.

Degradasi lahan sendiri diartikan sebagai sebuah kondisi dimana lahan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa memproduksi secara optimal. Terdapat dua faktor utama penyebabnya. Penyebab pertama adalah faktor manusia yang bercocok tanam tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan serta sistem budidaya monokultur.

Penyebab kedua adalah faktor alam, biasanya terjadi di wilayah tropis basah seperti Indonesia. Faktor topografi berupa topografi berombak, bergelombang, berbukit dan lereng curam menjadi salah satu penyebabnya. Selain topografi faktor iklim dengan curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi juga mempengaruhi.

Jika melihat dua faktor utama penyebab degradasi lahan tersebut. Selayaknya kita masih bisa berusaha optimal untuk mencegah degradasi lahan menjadi lebih buruk lagi. Kita bisa mengupayakan agar lahan yang sebelumnya terdegradasi bisa menjadi baik kembali. Serta mencegah degradasi lahan yang masih dalam kondisi baik.

Tema hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia tahun ini adalah *restoration, land, recovery*. Restorasi lahan dapat berkontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid19. Berinvestasi dalam restorasi lahan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan manfaat ekonomi, dan dapat memberikan mata pencaharian pada saat ratusan juta pekerjaan hilang.

Tema yang diusung sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama masa pandemi Covid19 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Triwulan pertama tahun 2021 pun masih mengalami hal yang sama yaitu kontraksi sebesar 0,74 persen. Hal menariknya

adalah sektor pertanian adalah sektor yang bisa terus tumbuh semasa pandemi ini.

Perhatian terhadap masalah lahan bukan saja berdampak pada pemulihan ekonomi tapi juga berdampak pada banyak hal. Bagian yang paling penting adalah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, karena pada hakikatnya sumber daya alam bukan hanya milik kita tapi juga akan diwariskan pada generasi mendatang. Mempertahankan dan memulihkan lahan dapat mengatasi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem. Lahan yang sehat akan bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Bagaimana kondisi lahan di Indonesia? Sebagai upaya menggambarkan kondisi pertanian secara utuh BPS melakukan Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi). Tahun 2020 lalu uji coba survei dilakukan di tiga provinsi di Indonesia yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil uji coba tersebut didapatkan data sebesar 89,72% penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai dibawah standar pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan. Sedangkan, hanya sekitar 10,28% lahan pertanian di ketiga provinsi tersebut yang telah memenuhi standar pengelolaan produktif sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan.

Jika melihat data tersebut maka selayaknya masalah degradasi lahan menjadi perhatian serius untuk kita semua. Pemerintah perlu turun tangan untuk mengatasinya. Sebagai langkah awal pada tahun ini akan dilakukan Sitasi di seluruh Indonesia. Hasil survei diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran khususnya untuk sektor pertanian.

Hasil survei tidak hanya memotret bagaimana produktivitas, kondisi lahan dan kondisi pertanian pada umumnya. Survei ini juga dapat menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi petani di Indonesia. Ketersediaan data yang tepat tentu akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah kurang sejahteranya petani. Mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Menjadikan profesi sebagai petani bukan lagi keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain. Tentu saja dampaknya akan terasa pada peningkatan produktivitas sebagai hasil dari berbagai inovasi.

Sebelum terlambat, saat ini pemerintah bisa lebih gencar memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi lahan dan sistem pertanian berkelanjutan. Disisi lain masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga lahan dari kerusakan. Semoga sinergi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat dapat mengatasi masalah degradasi lahan.

Tanggal Terbit : 18 Juni 2021
Media : infra-merah.com
Tautan : <https://infra-merah.com/2021/06/18/hari-pengendalian-degradasi-lahan-dan-kekeringan-sedunia-2021/>

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Lenna Nalurita, S.P.
Statistisi Ahli Pertama
BPS Kabupaten Tulang Bawang

Masker sebagai Pertahanan Terdepan

Pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini dituntut sebuah perubahan perilaku dari masyarakat guna mencegah penyebaran virus ini, salah satunya adalah menggunakan masker. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih mempertanyakan efektivitas dari penggunaan masker dalam mencegah penularan Covid-19 di masa pandemi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tentang terhadap perilaku masyarakat di masa pandemi. Survei ini dilakukan dari tanggal 7 September - 14 September 2020 secara daring dengan jumlah responden 90.967 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei mengatakan bahwa tingkat kepatuhan dalam menggunakan masker mencapai 92 persen. Hal itu berarti masih ada 8 persen masyarakat belum patuh menggunakan masker. Namun demikian, kebiasaan itu sudah mulai terkikis seiring berjalannya waktu.

Sementara itu, sampai dengan bulan April 2021 kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa dengan korban meninggal sebanyak lebih dari 45 ribu jiwa. Ini bukanlah angka yang kecil.

Meskipun demikian, lebih dari satu juta masyarakat berhasil sembuh dari Covid-19. Tentu dengan melalui proses penyembuhan yang sangat ketat. Setelah sembuh dari Covid-19 juga diharapkan masyarakat tersebut kembali mematuhi protokol kesehatan.

Vaksin Covid-19

Indonesia sedang gencar melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat. Sesuai dengan upaya Pemerintah dalam meraih peluang pemulihan ekonomi di 2021, proses vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkannya. Sampai dengan bulan April 2021 terdapat lebih dari 7,5 juta orang sudah divaksinasi covid-19 dosis kedua, dan sebanyak lebih dari 12,2 juta orang dosis pertama.

Setelah menerima vaksin, masyarakat pun tetap diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Penting untuk diingat bahwa program vaksinasi saat ini masih terus berjalan sehingga kekebalan komunitasnya bisa tercapai. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap menggunakan masker, masyarakat dapat saling melindungi satu sama lain.

Produksi Masker di Indonesia

Kebiasaan baru pada masyarakat yang selalu menggunakan masker membuat Pemerintah pun harus memerhatikan ketersediaan masker di pasaran. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa perusahaan BUMN akan meningkatkan produksi masker, salah satunya lewat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan masker di tengah wabah ini.

Selain produksinya yang harus diperhatikan, pengawasan terhadap penyebarluasan masker ini juga harus diperhatikan. Dengan adanya pengawasan ketat dari Pemerintah, masyarakat Indonesia di segala wilayah dapat menikmati masker dalam upaya mencegah Covid-19. Ditambah lagi, Pemerintah perlu melakukan menetapkan standar harga masker supaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sosialisasi Penggunaan Masker

Belajar dari kasus tsunami Covid-19 di India, penyebab terbesar lonjakan adalah kelalaian masyarakat India dalam mematuhi protokol kesehatan (3M), salah satunya penggunaan masker. Dewasa ini, kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker semakin berkurang. Hal ini dapat membuka besarnya peluang penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap penggunaan masker demi masa depan bebasnya Indonesia dari pandemi Covid-19.

Tanggal Terbit : 3 Mei 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/lenna-nalurita/masker-sebagai-pertahanan-terdepan-1vfj9tjrl8u>

<https://lampung.bps.go.id>



Ir. Nurul Andriana
Statistisi Ahli Madya Koordinator Fungsi
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Lampung

Pandemi dari Lensa Ekonomi

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Lampung juga saat ini tengah berjibaku melawan pandemi. Tak hanya meluluhlantakkan sistem ketahanan bidang kesehatan, pandemi juga sudah menginfeksi perekonomian Lampung, dan juga seluruh provinsi lainnya di Indonesia. Seolah tak ingin tinggal diam, jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Berbagai kebijakan diambil, tentu diiringi konsekuensi yang harus ditempuh. Lalu, bagaimana potret perekonomian Lampung di tengah pandemi ditinjau dari berbagai data?

Laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2020, mengalami kontraksi 1,67 persen di masa pandemi, walau sedikit lebih baik dari angka nasional sebesar minus 2,07 persen. Perdagangan dan industri manufaktur adalah dua sektor utama yang mengerek jatuhnya pertumbuhan. Angka tersebut menempatkan Lampung pada posisi kedelapan se-Sumatera, atau dengan kata lain, hanya sedikit lebih baik dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Padahal, sebelum pandemi menyerang, pertumbuhan ekonomi Lampung senantiasa berada di atas lima persen dan mengungguli pertumbuhan nasional. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak pandemi terhadap perekonomian di provinsi ini.

Menurunnya mobilitas penduduk disinyalir menjadi faktor utama. Hal ini tercermin sangat jelas dari data *Google mobility* yang diolah oleh tim BPS Provinsi Lampung. Sebagai dampak dari kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah, mobilitas di berbagai aktivitas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Masyarakat cenderung menahan diri di rumah, dan hanya melakukan aktivitas di tempat belanja dan obat-obatan guna mencukupi kebutuhan harian. Sementara itu, data *Google mobility* menunjukkan bahwa perdagangan ritel dan rekreasi, aktivitas di taman dan tempat transit menurun dari biasanya, termasuk aktivitas di tempat kerja juga menunjukkan penurunan. Masyarakat dihimbau agar melakukan proses belajar mengajar secara daring, pun demikian bagi para pekerja yang memungkinkan untuk melakukannya secara virtual.

Angka pengangguran dan kemiskinan pun meleset dari target yang telah ditetapkan. Pandemi memaksa mesin-mesin di perusahaan menurunkan temponya, memulangkan para pekerjanya. Sedikitnya, terdapat 33,91 ribu orang terpaksa kehilangan pekerjaannya. Angka tersebut adalah kondisi Agustus 2020, yang menandakan potensi bertambah mengingat kondisi

pandemi yang tak kunjung membaik. Alhasil, peningkatan kemiskinan pun tak terelakkan, upaya pembangunan manusia pun sedikit tersendat. Meski sedikit meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini kemungkinan besar karena terganggunya kinerja perekonomian secara makro. Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung pada September 2020 sebesar 12,76 persen, menunjukkan peningkatan dibanding periode waktu yang sama tahun 2019 sebesar 12,30 persen.

Di saat seluruh sektor terkena dampak dari pandemi, sektor jasa kesehatan justru tumbuh melesat, yaitu sebesar 10,93 persen. Hal ini dikarenakan banyak dilakukan tes antibodi dan antigen di setiap kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga menempati urutan kedua yang mencatatkan pertumbuhan terbesar selama 2020 yaitu sebesar 8,02 persen. Kebijakan pembatasan oleh pemerintah memaksa masyarakat melakukan kegiatannya melalui daring. Sekolah, bekerja, rapat, dan bahkan reuni pun dilakukan secara daring. Permintaan akan jasa informasi dan komunikasi meningkat, mendorong peningkatan konsumsi internet. Kebiasaan baru di era pandemi ini nampaknya menjadi harapan baru perekonomian digital. Pasalnya, dengan permintaan yang terus meningkat, kontribusinya dalam perekonomian yang saat ini tercatat 4,31 persen akan juga meningkat.

Sektor lain yang tak kalah pentingnya dan juga masih tumbuh positif adalah sektor pertanian. Sektor ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian Lampung, pasalnya, hampir sepertiga PDRB Lampung disumbang oleh sektor pertanian, tepatnya 29,90 persen. Pada tahun 2020, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,66 persen, sedikit melambat dibanding pada tahun 2019 sebesar 1,34 persen. Pertumbuhan yang positif, dikarenakan pada sub sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan 4,58 persen, seperti yang disampaikan pada rilis KSA (1 maret 2020) produksi padi di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sebesar 486,20 ribu ton (22,47 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 2,16 juta ton GKG. Demikian juga dengan sub sektor perikanan dan sub sektor jasa pertanian dan perburuan, yang masih tumbuh positif 2 persen dan 2,54 persen. Sedangkan sub sektor lain mengalami kontraksi, kontraksi terdalam adalah pada sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Tanaman Hortikultura.

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,76 persen; Perdagangan sebesar 18,86 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,17 persen (hasil Sakernas Agustus 2020). Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 4,16 poin dibanding Agustus 2019.

Surya Ayomi (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian tidak mampu menekan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dengan demikian mengingat perannya cukup besar dalam penciptaan nilai tambah ekonomi Provinsi Lampung, perlu upaya lebih dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah dengan adanya rangsangan ekonomi berupa terjangkauanya harga sarana produksi, harga jual yang baik, serta penggunaan teknologi dan sasaran penanganan pasca panen. Selain bertumpu pada rangsangan ekonomi, adanya perbaikan saluran tersier dan peningkatan subsidi input pertanian oleh pemerintah akan dapat secara efektif menjangkau kebutuhan khususnya sektor pertanian.

Tanggal Terbit : 5 Maret 2021
Media : Lampung Post
Tautan : -

<https://lampung.bps.go.id>



Sartika Yuliani Siregar, S.S.T., M.Stat.
Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat

Potret Kemiskinan Lampung

Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia saat ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Lampung hingga 41,82 ribu jiwa dalam enam bulan (Maret-September 2020). Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2020 mencapai 1091,14 ribu jiwa atau setara dengan 12,76 persen.

Selain jumlah penduduk miskin yang meningkat, hasil rilis menunjukkan kemiskinan di Lampung semakin dalam dan parah. Hal ini tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat dari 1,89 menjadi 2,11 dan indeks keparahan meningkat dari 0,41 menjadi 0,57 dalam waktu enam bulan. Dengan meningkatnya kedua indeks ini berarti bahwa kemiskinan semakin sulit diatasi. Karena dengan meningkatnya indeks kedalaman maka semakin jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari pendekatan pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) maka dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

GK Lampung kondisi September 2020 sebesar Rp457.495,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan sebesar 0,83 persen dari Maret 2020. Peranan komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada September 2020, sumbangan komoditas makanan terhadap GK sebesar 75,4 persen. Dua komoditas makanan yang sangat berpengaruh terhadap GK adalah beras dan rokok kretek filter baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan di Lampung, perdesaan masih menjadi lumbung penduduk miskin. Pada September 2020, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,22 persen sedangkan di perkotaan mencapai 9,59 persen. Kemiskinan di perdesaan naik 0,39 persen sedangkan di perkotaan naik 0,57 persen dari Maret 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan

di perkotaan lebih tajam dibanding dengan di perdesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk perkotaan menggantungkan hidupnya pada sektor industri pengolahan, transportasi, perdagangan, penyediaan makan minum, dan jasa-jasa. Sektor-sektor inilah di saat terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi yang mengalami dampak paling besar.

Pandemi Covid-19 membuat sejarah dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Lampung. Dari Maret 2016, persentase kemiskinan di Lampung terus mengalami penurunan. Namun, adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyerang Indonesia pada awal Maret 2020 mampu menaikkan kembali kemiskinan di Lampung kondisi Maret 2020. Bahkan baru satu bulan dari pandemi Covid 19 melanda, angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan menjadi 12,34 persen dibandingkan September 2019. Kenaikan angka kemiskinan semakin besar pada September 2020, naik sebesar 0,42 persen dalam waktu enam bulan. Kondisi ini disebabkan karena pandemi Covid-19 semakin parah melanda Lampung dengan lonjakan kasus yang semakin tinggi pada September 2020.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah Lampung untuk menekan laju angka kemiskinan akibat pandemi covid-19. Bantuan stimulus berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT dana desa, insentif tarif listrik, bantuan untuk UMKM belum mampu meredam naiknya angka kemiskinan di Lampung. Ke depannya, untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Lampung diharapkan bantuan stimulus ini tetap diberikan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penduduk miskin.

Tidak hanya penduduk miskin, namun juga kelompok hampir miskin dan rentan miskin perlu untuk dijadikan perhatian pemerintah Provinsi Lampung. Karena bisa jadi kedua kelompok ini rawan untuk masuk ke dalam kelompok penduduk miskin jika pandemi terus berlangsung. Pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial perlu secara kontinu dilakukan agar data penduduk miskin terus terbaru.

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial akan mengadakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggandeng Badan Pusat Statistik dalam pelatihan petugas dan pelaksanaan lapangannya. Cakupan DTKS juga diperluas hingga 60 persen terbawah yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Perluasan cakupan ini menjadi penting sebagai antisipasi ketika pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial nonregular karena guncangan ekonomi yang terjadi tiba-tiba. Kegagalan penyaluran

bantuan sosial tunai karena pandemi tahun 2020 menjadi pelajaran untuk penyempurnaan DTKS.

Yang perlu diperhatikan adalah setelah DTKS tersebut dimutakhirkan secara nasional, maka verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota harus secara rutin dilakukan. Bahkan dalam SKB tiga Menteri, yaitu Kementerian Sosial, Keuangan, dan Dalam Negeri, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Sanksi ini diberikan karena DTKS yang akurat dan up to date sangat diperlukan agar bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran sehingga mempercepat penurunan kemiskinan di Lampung.

Kebijakan pemerintah bisa segera diambil berdasarkan data terbaru, tanpa ada tumpang tindih data ataupun terlewat dalam penerimaan bantuan. Demikian juga dalam hal keterlambatan penyaluran bantuan dapat dihindarkan sehingga dampak negatifnya yang dapat meningkatkan angka kemiskinan dapat diminimalkan.

Tanggal Terbit : 8 Maret 2021
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/opini/potret-kemiskinan-lampung/>

<https://lampung.bps.go.id>



Wike Yulia, S.S.T.
Statistisi Ahli Muda
BPS Provinsi Lampung

Potensi Generasi Z dan Milenial Lampung di Tengah Era Ekonomi Digital

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung telah merilis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) pada tanggal 21 Januari 2021. Hasil SP2020 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 9,01 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil SP2010, selama sepuluh tahun terakhir terjadi penambahan 1,40 juta jiwa penduduk.

Menariknya, struktur usia penduduk Lampung didominasi Generasi Z (Gen Z) dan Generasi Milenial. Penduduk Gen Z mencapai 27,80 persen dan penduduk Generasi milenial mencapai 25,54 persen. Dominannya jumlah penduduk Gen Z dan Generasi Milenial di Lampung menunjukkan bahwa transisi struktur penduduk tengah berjalan dan mengarah pada tercapainya *demographic dividend* atau bonus demografi. Hasil SP2020 menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di Lampung meningkat, dampaknya rasio ketergantungan menurun. Jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) sendiri mencapai 70,31 persen.

Gen Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997–2012 atau kini usianya berada pada kisaran 8–23 tahun. Gen Z masuk kategori anak dan remaja, sebagian di antara mereka masih bersekolah, sebagian lainnya sedang bersiap lulus kuliah, dan sebagian lainnya ada yang sudah menjadi generasi para pekerja baru. Sebutan lain untuk Gen Z adalah Generasi *Post-Milenial*. Sementara Generasi Milenial sendiri adalah penduduk yang lahir tahun 1981–1996 atau kini usianya berada pada kisaran 24–39 tahun.

Penduduk Gen Z memiliki karakteristik yang unik. Dilansir <https://websis.co.id>, penduduk Gen Z sangat bergantung koneksi internet, lebih terdidik dibanding generasi-generasi sebelumnya, lebih peka bahwa dunia ini banyak masalah, menghargai keberagaman, berorientasi target, dan mengutamakan privasi. Kontribusi Gen Z terhadap produktivitas ekonomi baik skala nasional maupun regional memang belum tergolong cukup signifikan. Namun, peran mereka dalam konteks menggeser pola dan perilaku konsumsi rumah tangga tidak dapat diremehkan. *Nielsen Consumer* dan *Media View* pernah menyampaikan bahwa Gen Z memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan membeli di keluarga. Dua hal utama yang dipengaruhi adalah keputusan berlibur dan membeli produk elektronik.

Pengambilan keputusan berlibur dalam keluarga yang diambil Gen Z memiliki kesamaan karakter dengan Generasi Milenial. Keduanya mengutamakan memilih produk-produk berlibur yang informasinya didapat melalui *browsing* dan informasi di media sosial. Contoh produk-produk tersebut misalnya perhotelan, restoran, paket liburan, pergudangan, dan jasa pengantaran barang. Uniknya, dalam penggunaan medsos, Gen Z lebih terbiasa dengan Instagram, Vimeo, Path, Line, dan menganggap Facebook lebih cocok untuk kakak, orang tua, atau Generasi Milenial lainnya.

Masih berhubungan dengan penggunaan internet, berbagai studi menemukan bahwa Gen Z memiliki kelekatan tinggi dengan *mobile internet*. Bahkan ada subsegmen Gen Z yang tidak pernah menggunakan *desktop computer*. Mereka menggunakan *laptop, smartphone, smartwatch*, dan berbagai piranti bergerak lainnya untuk terkoneksi dengan internet. Lebih jauh lagi, Kantar Millward Brown melalui *Project Wayang* (2017) menemukan bahwa teknologi *mobile* sangat terintegrasi dengan keseharian Gen Z. Piranti bergerak sudah menjadi area sangat pribadi Gen Z dan menjadi kepanjangan tangan mereka.

Sisi positif lainnya, Gen Z dan Generasi Milenial dapat mendorong percepatan Indonesia masuk ke Revolusi Industri 4.0. Gen Z dan Generasi Milenial mudah beradaptasi dengan teknologi, bukan hanya konsumen tapi juga *creator*. Saat ini, berdasarkan data *startup ranking, startup* Indonesia berada pada peringkat lima dunia. Dilihat dari sisi jumlah mencapai 2.200 usaha. Ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi digital Indonesia sangat prospektif.

Berdasarkan Survei *E-Commerce* Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 13.485 usaha *e-commerce*. Nilai pendapatan usaha dari penjualan internet sepanjang tahun 2019 mencapai 17,21 triliun rupiah dengan jumlah transaksi *online* sebanyak 24,82 juta transaksi.

Di Lampung, perkembangan usaha *e-commerce* tengah bertumbuh. Menurut data BPS tahun 2019, dari semua usaha yang ada di Provinsi Lampung, 18,48 persen sebagai usaha *e-commerce*. Persentase ini paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 15,08 persen. Dari jumlah yang tercatat tersebut, sebagian besar (40,83 persen) memulai penjualan secara *online* pada rentang tahun 2017–2018. Usaha *e-commerce* yang memulai penjualan *online*-nya pada tahun 2019, mencapai 35,90 persen.

Sisi lainnya, melimpahnya Gen Z dan Generasi Milenial justru memiliki tantangan tersendiri. Jika tidak optimal dikelola dengan baik dari sisi regulasi, insentif, pendidikan, dan ruang inovasi maka bisa menjadi beban karena kedua generasi tersebut terjebak hanya menjadi kelas konsumen digitalnya saja. Beli barang dari *e-commerce* namun barangnya impor.

Solusinya, Pemprov Lampung kini mesti sudah mulai membenahi sektor-sektor utama penyerap tenaga kerja dalam menampung “aspirasi” perilaku Gen Z dan Generasi milenial terutama pengokohan sektor ekonomi digital. Revitalisasi jaringan internet yang lebih masif dan luas, penyediaan *bandwidth* internet yang lebih *powerfull* merupakan upaya awal yang dapat dipertimbangkan. Peningkatan keterampilan dan pembedaan vokasi di bidang TIK bagi para remaja juga perlu menjadi pertimbangan. Ketiga diselenggarakannya kompetisi-kompetisi adu kreasi yang lebih intensif untuk mencari bibit unggul dalam bidang TIK. Keempat, bauran kebijakan yang pro pengembangan TIK dan ekonomi digital ke depan.

Alternatif lain yang dapat dikembangkan adalah dengan terus *drive* sektor pertanian ke arah yang lebih modern dan lebih bergengsi bagi para remaja. Regenerasi petani saat ini cenderung stagnan dan didominasi usia 45 tahun ke atas (Generasi X). Meskipun anak muda mulai banyak yang tertarik pada pertanian namun jumlahnya tidak banyak. Padahal sektor pertanian merupakan sektor strategis. Tren *agritech* harus sudah mulai digencarkan pada Gen Z dan Generasi Milenial. Kebijakan pertanian berbasis *agritech* seperti adopsi teknologi modern, pelatihan, dan akses pasar atau pengolahan pasca panen harus menjadi fokus pemerintah.

Dari sisi industri manufaktur, *skill development programme* dan vokasi juga harus menjadi program prioritas pemerintah agar Gen Z utamanya mampu lebih kompetitif masuk ke pasar kerja industri manufaktur. Dari sisi investasi, pemerintah perlu terus mengundang para pemilik modal agar mau berinvestasi di Lampung dengan menyediakan kawasan khusus industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Terakhir, *booming*-nya ekonomi digital perlu dimanfaatkan untuk menciptakan wirausaha baru dan pada akhirnya akan membuka lapangan kerja di berbagai sektor usaha. Saat ini tercatat, meskipun Gen Z dan Generasi Milenial cukup dominan dalam struktur penduduk Indonesia namun jumlah wirausahawan muda jumlahnya hanya tiga persen dari total penduduk Indonesia.

Tanggal Terbit : 15 Maret 2021

Media : Harian Momentum

Tautan : <http://m.harianmomentum.com/read/32541/news-detail-sample-post.html>

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Woro Ayu Prasetyaningtyas, S.S.T.
Statistisi Ahli Muda Koordinator Fungsi Neraca
Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Tulang Bawang

Sensus Pertanian 2023 untuk Pertanian Maju

Indonesia akan kembali melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2013. Ini adalah agenda rutin sepuluh tahunan yang diamanatkan pada lembaga pemerintah yang biasa disebut sebagai Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian ini sudah dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963 berdasarkan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden. Dengan demikian tahun 2023 nanti merupakan Sensus Pertanian ketujuh yang akan diselenggarakan oleh negara Indonesia.

Sektor Pertanian sebagai Sektor Penopang

Indonesia masih dikenal sebagai negara agraris. Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam menunjang perekonomian nasional. Pada tahun 2020, sektor pertanian menyerap 29,76 persen tenaga kerja. Banyaknya pekerja di sektor pertanian ini meningkat sebesar 2,23 persen dibanding tahun 2019 yang memiliki jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 27,53 persen.

Dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, pada tahun 2020 sektor pertanian menyumbang sebesar 13,70 persen atau sebanyak lebih dari 2115 triliun. Share sektor pertanian ini juga meningkat 0,99 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,71 persen.

Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian berhasil menunjukkan pertumbuhan positif. Di saat sektor lapangan usaha yang lain bergerak melambat, sektor pertanian memberikan arah pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar -2,07. Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen.

Manfaat Sensus Pertanian

Pembangunan di sektor pertanian membutuhkan dukungan data yang memotret kondisi secara komprehensif dan terkini, sehingga penentuan kebijakan yang tepat dan efektif dapat diwujudkan karena dilakukan dengan berbasis bukti (*evidence based policy*). Selain itu, banyak isu baru terkait pangan dan sektor pertanian yang harus dikumpulkan datanya. Misalnya, isu pertanian berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* yang merupakan isu global dan regenerasi petani serta modernisasi sektor pertanian yang merupakan isu nasional. ST2023 disiapkan guna menyediakan

data yang dibutuhkan untuk menjawab isu-isu strategis terkini di bidang pangan dan pertanian, baik dalam konteks global maupun nasional.

Sukseskan Sensus Pertanian 2023

Pada tahun 2023 nanti akan ada 18 negara yang akan menyelenggarakan Sensus Pertanian, termasuk Indonesia. Di Indonesia kegiatan pertanian yang dicakup meliputi 7 subsektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Jasa Pertanian.

Rangkaian persiapan kegiatan Sensus Pertanian tahun 2023 sedang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan adanya ST2023 diharapkan tersedia sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu juga diharapkan tersedia data Statistik Pertanian, baik dalam bentuk tabular maupun geospasial.

Sensus Pertanian 2023 nanti pun akan memanfaatkan data Sensus Penduduk 2020 dengan cara mengidentifikasi adanya penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani. Metode pengumpulan datanya juga akan menggunakan berbagai cara, di antaranya adalah CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*), CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*), dan PAPI (*Pencil and Paper Interviewing*).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebaiknya kita juga turut mendukung kegiatan Pemerintah ini. Bentuk dukungan itu bisa diwujudkan dengan cara memberikan informasi apa adanya, terkhusus bagi rumah tangga pertanian yang akan menjadi sasaran responden pada kegiatan ini. Data pertanian yang akurat akan menentukan arah kebijakan yang tepat.

Tanggal Terbit : 5 Mei 2021
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/woro-ayu/sensus-pertanian-2023-untuk-pertanian-maju-1vgTWlxDhC4>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email: bps1800@bps.go.id, Situs: www.lampung.bps.go.id

ISBN 978-602-7746-83-1 (PDF)



9 786027 746831